

**ANALISIS KOMPARATIF KEBIJAKAN EKONOMI SUB SEKTOR**

**PERIKANAN PADA TAHUN 2010 - 2017**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna Memenuhi salah satu syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Program Studi Ekonomi pembangunan(EP)*



Oleh

Nama : SALMAN PARIS  
NPM : 1505180008  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan(EP)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA

MEDAN

2019



### PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mubammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya,

#### MEMUTUSKAN

Nama : SALMAN PARIS  
NPM : 1505180008  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : ANALISIS KOMPARATIF KEBIJAKAN EKONOMI  
SUBSEKTOR PERIKANAN PADA TAHUN 2010-2017

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

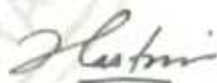
#### Tim Penguji

Penguji I



(Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si)

Penguji II



(HASTINA FEBRIATY, SE, M.Si)

#### Pembimbing



(Dra. Hj. LAILAN SAFINA, M.Si)


#### Panitia Ujian

Ketua



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris



(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SALMAN PARIS  
N.P.M : 1505180008  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : ANALISIS KOMPERATIF KEBIJAKAN EKONOMI  
SUBSEKTOR PERIKANAN PADA TAHUN 2010-2017

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi,

Medan, 3 September 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. LAILAN SAFINA HSB, M.M.

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARLANI RS

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE, M.M, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : SALMAN PARIS  
N.P.M : 1505180008  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : ANALISIS KOMPERATIF KEBIJAKAN EKONOMI SUBSEKTOR PERIKANAN PADA TAHUN 2010-2017

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
19-09-2019	- Dalam analisis data, cari variabel terdapat kearah atau penemuan apa saja - Bilas lebih banyak kearah ke 200-300 kapal 2015 -	J Ln	
23-09-2019	- Lebih lanjut kearah penemuan produk, dan untuk nilai ekspor hasil ke penemuan kurs	J Ln	
26-09-2019	- Bertindak Kesimpulan dan rumus	J Ln	
30-09-2019	- Bertindak koreksi L yg ada - Buat abstrak - lengkap lampiran - Melak lebih diperhalus dan UIC untuk pidang	J Ln	

Pembimbing Skripsi

(Dra. LAILAN SAFINA HSB, MSi)

Medan, 30 September 2019  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan

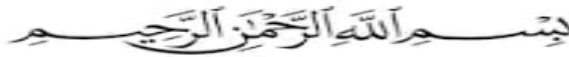
(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS)

## **ABSTRAK**

Penelitian Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan sektor perikanan dari tahun 2010-2017 mengingat Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia seharusnya dapat menyumbang kontribusi besar bagi PDB Indonesia . Tujuan Penelitian ini terbagi atas 2 tujuan yaitu:(1). mengkomparasi kebijakan yang di lakukan pemerintah dalam meningkatkan meningkatkan potensi perikanan di Indonesia pada tahun 2010-2017. (2). melihat perkembangan sektor perikanan yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2010-2017 melalui PDB Indonesia,Ekspor dan Produksi perikanan indonesia.pada dasarnya sektor perikanan belum mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB Indonesia.data yang di gunakan adalah data Sekunder dengan sumber data melalui website Badan Pusat Statistik (BPS) . data di himpun dari tahun 2010-2017 (7 tahun). berdasarkan data yang di ambil PDB Indonesia dari sektor perikanan belum mampu berkontribusi besar terhadap PDB Indonesia dari banyaknya kebijakan-kebijakan yang di lakukan pemerintah untuk meningkatkan sektor perikanan.

**Kata Kunci :** Kebijakan pemerintah,PDB,ekspor

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikumWr.Wb**

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesehatan, kesabaran serta kekuatan dan tak lupa Shalawat bernadakan salam kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul: **“ANALISIS KOMPARATIF KEBIJAKAN EKONOMI SUB SEKTOR PERIKANAN PADA TAHUN 2010 - 2017”**, yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terwujudnya skripsi ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugasnya, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan segala kerendahan hati kepada:

1. Orang tua yang saya sayangi khususnya buat ayah saya Tamrin Pulungan dan Ibu saya Tiraya hasibuan beserta kakak saya Nora Niawarni Pulungan, serta abang saya Abdul saikum pulungan dan adik saya Sawalluddin Pulungan dan seluruh keluarga yang telah memberi dukungan dan semangatnya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Lailan Safina HSB SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan/arahan/masukan serta kritikan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si.,Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, Selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Roswita Hafni, M.Si., Selaku Sekertaris Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh dosen mata kuliah Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh staf Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada Sahabat – sahabat seperjuangan, Rahmat Hidayat, Pahmi Irham, Imam Satrio, Habibi maha dan orang spesial yaitu Juliana Hsb yang telah membantu dan dukungan kepada saya.
10. Kepadaseluruhteman – temandariEkonomi Pembangunan stambuk 2015 yang tidak bias saya sebutkan satu-persatu yang telah member dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh adik-adik saya di Ekonomi pembangunan dari stambuk 2016 sampai 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah member dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam menerapkan ilmu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan apabila dalam penulisan terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Medan, September 2019

Penulis

SALMAN PARIS



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1..LatarBelakang .....	1
1.2.Identifikasi Masalah .....	7
1.3..BatasanMasalah Dan RumusanMasalah.....	8
1.3.1. Batasan Masalah.....	8
1.3.2.Rumusan Masalah .....	8
1.4. Tujuan Dan Manfaat penelitian .....	8
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
2.1. Teori Pendapatan Nasional.....	10
2.2. Peraturan Tentang Perikanan.....	16
2.3.Potensi Kinerja Pembangunan Kelautan .....	19
2.4.Jenis-Jenis Perikanan Di Indonesia .....	20
A.Perikanan Darat.....	20

B. Perikanan Laut.....	21
2.5. Penelitian Terdahulu.....	23
2.6. Kerangka Konseptual.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1. Pendekatan Penelitian.....	26
3.2. Defenisi Operasional Variabel .....	26
3.3. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	27
3.4. Teknik Pengumpulan data .....	27
3.5. Teknik Analisis Data.....	28
<b>BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
4.1 Gambaran Umum Geografis dan Demografi.....	29
4.1.1 Letak Geografis.....	29
4.1.2 Kondisi Topografi .....	32
4.1.3 Kondisi Demografis .....	33
4.1.4 Struktur Ekonomi .....	34
4.2. Analisis Komparatif Kebijakan Subsektor Perikanan.....	37
4.2.1. Kebijakan Perikanan Pada Tahun 2010-2014.....	37
4.2.2. Kebijakan Perikanan Pada Tahun 2015-2017.....	40
4.2.3 Perkembangan Sektor Perikanan di Indonesia.....	43
4.2.4 Perkembangan Nelayan Dan Pengusaha Perikanan Darat....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan.....	61

5.2 Saran.....63

**DAFTAR PUSTAKA.....64**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.Peta indonesia.....	30
--------------------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Produk Domestik Bruto Perikanan Indonesia Dengan Harga Konstan Tahun 2010-2017 (Milyar Rupiah).....	2
Tabel 1.2. Nilai Ekspor Komoditi Perikanan Indonesia 2012-2017.....	6
Tabel 2.1. Penelitian terdahulu.....	23
Tabel 3.1. Defenisi Operasional.....	27
Tabel 4.1. Luas wilayah indonesia terbagi 34 provinsi.....	31
Tabel 4.2. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Indonesia.....	34
Tabel 4.3. PDB Indonesia Tahun 2010-2017.....	35

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 4.1. Produk Domestik Bruto Perikanan Indonesia Dengan Harga konstan Tahun 2010-2017 (Milyar Rupiah) .....	46
Grafik 4.2. Nilai Ekspor Komoditi Perikanan Indonesia 2010-2017.....	48
Grafik 4.3. Produksi Perikanan Indonesia (Ribu Ton).....	50
Grafik 4.4 Tabel Jumlah Kapal/Perahu Nelayan Di Indonesia tahun 2010-2016...	53
Grafik 4.5. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Tahun 2010-2016.....	55
Grafik 4.6. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Darat Tahun 2010-2016.....	58

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1..Latar Belakang

Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 2,01 juta km<sup>2</sup> daratan, 3,25 juta km<sup>2</sup> lautan, dan 2,55 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan garis pantai yang sangat panjang lebih dari 81.000 km Negara Indonesia merupakan negara dengan luas perairan lebih besar dari pada luas daratan, sehingga disebut sebagai negara maritim.

Luas wilayah kelautan di negara Indonesia melebihi dari daratan, itu yang membuktikan bahwa Indonesia memiliki kemewahan yang luar biasa dalam sektor kelautan. Kekayaan laut yang dimiliki seperti ikan, udang, terumbu karang dan biota laut lainnya. Hal ini seharusnya bangsa Indonesia harus benar-benar memanfaatkan sumber daya kelautan karena selain banyaknya kekayaan alam laut Indonesia kelautan juga dapat mengurangi dan menyerap banyak tenaga kerja selain dari pada sektor pertanian, akan tetapi sektor perikanan juga dapat mendorong masyarakat pesisir yang secara garis pantai Indonesia yang sangat panjang tentu banyak masyarakat yang berharap dari sektor perikanan inilah yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu sektor kelautan dan perikanan seharusnya dapat berkontribusi besar bagi pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Tetapi faktanya, saat ini sektor perikanan belum mampu berkontribusi secara optimal bagi pembentukan PDB di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**

**Produk Domestik Bruto Perikanan Indonesia Dengan Harga konstan Tahun  
2010-2017 (Milyar Rupiah)**

Tahun	PDB Sektor Perikanan	PDB Indonesia	Persentasi (%)
2010	143559.4	6864133.1	2,091
2011	154545.2	7287635.3	2,120
2012	164264.3	7727083.4	2,125
2013	176149.3	8156497.8	2,159
2014	189089.7	8564866.6	2,207
2015	204016.8	8982517.1	2,271
2016	214523.2	9434632.3	2,273
2017	227278.9	9912749.3	2,292

*Sumber: BPS Indonesia*

Dari tabel di atas terlihat bahwa produk domestik bruto Indonesia untuk sektor perikanan sepanjang tahun 2010-2017 mengalami peningkatan walaupun tidak begitu besar dari tahun ke tahun tetapi peningkatan PDB perikanan terus meningkat. Dimana, tahun 2010 PDB perikanan dari sektor perikanan hanya sebesar 143559.4 milyar dan kontribusinya terhadap PDB Indonesia hanya sebesar 2,091%. Sampai tahun 2017 PDB hanya dapat menyumbang PDB sebesar 227278.9 milyar dan kontribusi terhadap PDB nasional hanya sebesar 2,292%. Walaupun peningkatan terus terjadi tetapi peningkatan itu belum dapat optimal berkontribusi bagi pembentukan PDB nasional.



Luasnya perairan dan kayanya sumberdaya kelautan Indonesia membuat perhatian masyarakat luar negeri menjadi menyukai hasil laut Indonesia. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi Negara asing atau orang yang tidak bertanggungjawab yang memungkinkan melakukan tindak kejahatan terhadap Indonesia. Memanfaatkan kekayaan bahari Indonesia dengan menangkap ikan secara *illegal* untuk mencari keuntungan yang besar yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri. *Illegal Fishing* merupakan masalah yang sering dihadapi oleh negara yang memiliki perairan luas karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu. Namun hingga sekarang masalah *Illegal Fishing* masih belum dapat diberantas, hal ini dikarenakan untuk mengawasi wilayah laut yang luas merupakan hal yang sulit. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki wilayah perairan luas juga terkena permasalahan *Illegal Fishing* dikarenakan Indonesia memiliki potensi sumber daya hayati perairan yang besar. .

Besarnya potensi kelautan Indonesia menjadi ancaman yang serius apabila pengamanan di kelautan belum maksimal, hal ini dikarenakan kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah yang sering terjadi *Illegal fishing* serta luasnya wilayah laut yang menjadi wilayah hukum kedaulatan Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*High Seas*) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan *Illegal Fishing*. Permasalahan bagi pelaku *Illegal Fishing* yang melewati atau melintasi batas kedaulatan negara maka akan dihukum sesuai aturan negara tersebut, serta diatur sesuai hukum UNCLOS pasal 49 tahun 1982

yang menjelaskan mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh para nelayan asing, karena itu tertulis di dalam pasal tersebut bahwa status hukum perairan kepulauan, ruang udara di atas perairan kepulauan dan dasar laut serta tanah dibawahnya merupakan batas kedaulatan milik negara tersebut, sehingga apabila para nelayan asing, yang melewati kedaulatan negara tersebut dan melakukan aksi pencurian ikan, maka hal itu bisa ditegaskan sebagai tindakan *Illegal Fishing*.

Kasus *Illegal Fishing* di Indonesia kurang mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia sendiri, padahal kejahatan *Illegal Fishing* di wilayah laut Indonesia mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemerintah Indonesia, selain itu sumber perikanan di Indonesia merupakan sumber kekayaan yang sangat besar untuk dapat dikembangkan bagi kemakmuran bangsa Indonesia sehingga menunjukkan betapa pentingnya sumber kekayaan hayati perikanan bagi Indonesia.

Dampak dari *Illegal Fishing* yang terjadi selama ini paling dirasakan oleh nelayan Indonesia, hal ini dikarenakan para nelayan memanfaatkan kekayaan laut untuk menangkap ikan dan sejenisnya serta akibat maraknya praktik *Illegal Fishing* aktivitas para nelayan dalam mencari ikan di laut terhambat sehingga hasil yang di dapat tidak sesuai dengan kebutuhan mereka sehari-hari. nelayan asing yang melakukan *Illegal Fishing* ini menangkap ikan di laut Indonesia secara besar-besaran dan dengan cara yang dapat merusak habitat ikan di dalam laut seperti menangkap ikan menggunakan bom, racun, dan berbagai alat tangkap terlarang yang melanggar ketentuan undang-undang yang ada. Hal ini

menyebabkan kerugian besar bagi negara dan khususnya terhadap nelayan Indonesia yang menggantungkan hidupnya di laut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla, berkomitmen memberantas kapal asing ilegal yang mencuri ikan di laut Indonesia. sejak Oktober 2014 hingga Agustus 2018 ini sudah ada sebanyak 488 kapal yang ditenggelamkan oleh KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, selama periode pemerintahan ini kapal terbanyak yang ditenggelamkan berasal dari negara Vietnam, yakni sebanyak 276 kapal, Filipina 90 kapal, Thailand 50 kapal, dan Malaysia 41 kapal.

Kemudian ada juga kapal ilegal dalam negeri yang mencuri ikan sebanyak 26 kapal serta Papua Nugini 2 kapal. Dari negara mitra dagang China 1 kapal, Belize 1 kapal dan dari tanpa negara 1 kapal. Sementara di tahun 2018 tercatat sebanyak 125 kapal sudah ditenggelamkan. Penenggelaman dipimpin langsung oleh Menteri KKP Susi selaku komandan satuan tugas pemberantas penangkapan ikan secara ilegal. pada tahun 2018 ini kapal ilegal yang paling banyak tertangkap ada dari daerah Natuna sebanyak 40 kapal. Selain itu, 215 kapal yang ditenggelamkan terbanyak dari negara Vietnam sebanyak 86 kapal.

Sementara kementerian perikanan Indonesia terus berupaya untuk meningkatkannya ekspor di Indonesia. setelah banyaknya kapal yang *illegal* di tangkap, pemerintah Indonesia terus mendorong para nelayan untuk menangkap ikan yang lebih banyak tanpa merusak lingkungan dan ekosistem laut. terlihat dari setelah banyaknya kapal yang di tangkap membuat efek jera kepada pelaku pencuri ikan. Walaupun dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan namun

sekarang kementrian perikanan tetap optimis dan bekerja keras untuk meningkatkan ekspor perikan Indonesia kembali ,dan dapat di lihat pada table di bawah ini;

**Tabel 1.2**

**Nilai Ekspor Komoditi Perikanan Indonesia 2012-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Nilai (Juta Dollar AS)</b>	<b>Ribu Ton</b>
<b>2010</b>	<b>2.863,83</b>	<b>1.103,57</b>
<b>2011</b>	<b>3.521,09</b>	<b>1.159,34</b>
<b>2012</b>	<b>3.871,34</b>	<b>1.240,09</b>
<b>2013</b>	<b>4.161,35</b>	<b>1.255,42</b>
<b>2014</b>	<b>4.461,54</b>	<b>1.273,23</b>
<b>2015</b>	<b>3,943,70</b>	<b>1.076,20</b>
<b>2016</b>	<b>4.172,25</b>	<b>1.075,20</b>
<b>2017</b>	<b>4.513,74</b>	<b>1.078,00</b>

*Sumber; BPS indonesia*

Dari tabel 1.2 di atas terlihat bahwa pada tahun 2010 ekspor perikanan mencapai 1.103,57 juta ton dengan nilai 2.863,83 miliar AS, dan sampai pada tahun 2014 peningkatan ekspor perikanan terus meningkat sampai mencapai 1.273,23 juta ton dengan nilai 4.461,54 miliar AS. selama 5 tahun dari tahun 2010-2014 peningkatan volume ekspor terjadi sebesar 15,37% dan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 15,47% karna volume ekspor perikanan indonesia terjadi penurunan tentu nilainya mengalami perununan, dan pada tahun 2015 nilainya hanya mencapai 3,943,70 miliar AS atau turun 11,60% dari tahun

2014 yang mencapai 4.461,54 miliar AS. dan sampai pada tahun 2017 nilai ekspor terus perikanan Indonesia terus meningkat mencapai 4.513,74 miliar AS, dan sudah melebihi nilai ekspor tahun 2014. Dan pada tahun 2017 volume ekspor komoditas ikan hanya mencapai 1.078,00 juta ton, atau lebih kecil dari tahun 2014 tetapi nilainya sudah melebihi tahun 2014. Inilah bukti upaya pemerintah terus meningkatkan ekspor perikanan walaupun peningkatan volume ekspornya lambat tetapi pemerintah terus meningkatkannya terlihat dari segi nilai ekspor yang kita lihat dari tabel tersebut.

Dengan adanya begitu banyak pelanggaran illegal fishing, kurangnya pengawasan dan pemamfaatan terhadap kelautan dan kurangnya kontribusi dari sektor PDB perikanan terhadap pembentukan PDB Indonesia dengan begitu luasnya perairan Indonesia dan kaya maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang di tuangkan dalam judul; **“ANALISIS KOMPARATIF KEBIJAKAN EKONOMI SUB SEKTOR PERIKANAN PADA TAHUN 2010 - 2017”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah yang didapat adalah sebagai berikut:

- 1) Sektor perikanan masih belum mampu memberikan berkontribusi yang besar terhadap pembentukan produk domestik bruto Indonesia.
- 2) Tingginya illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia terlihat dari banyaknya kapal yang di tangkap dan di tenggelamkan pada tahun 2014-2017 yang di lakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan.

- 3) kurangnya pengawasan terhadap perairan Indonesia dan alat tangkap yang kurang ramah lingkungan

### **1.3..Batasan Masalah Dan Rumusan Masalah**

#### **1.3.1. Batasan Masalah**

Untuk menghindari penafsiran yang salah terhadap judul penelitian yang akan di bahas oleh penulis, maka penulis melakukan pembatasan masalah pada kebijakan pemerintah sub sektor perikanan pada tahun 2010 - 2017 di Indonesia

#### **.1.3.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap sub sektor perikanan dari tahun 2010-2014 dan pada tahun 2015-2017.

### **1.4. Tujuan Dan Manfaat penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Peneliti ini bertujuan untuk:

- 1) Melakukan analisis tentang perkembangan sektor perikanan di Indonesia pada tahun 2010-2014 dan pada tahun 2015-2017.
- 2) Melakukan analisis komparasi kebijakan pemerintah sub sektor perikanan pada tahun 2010-2014 dan pada tahun 2015-2017.

### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari Penelitian ini adalah:

#### **1) Manfaat Akademik**

##### **a. Bagi Peneliti**

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dan menambah wawasan dan pengetahuan tentang perikanan di Indonesia, serta melihat perkembangan sektor perikanan di Indonesia.

##### **b. Bagi Masyarakat**

Kepada masyarakat diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perikanan dan kebijakan pemerintah yang telah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2010-2017 dan melihat perkembangan perikanan Indonesia. serta diharapkan dapat menambah wawasan dan acuan bagi peneliti selanjut.

#### **2) Manfaat non akademik**

Sebagai bahan acuan bagi pemerintah Indonesia dalam pembentukan kebijakan ekonomi terutama bagi sub-sektor perikanan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Teori Pendapatan Nasional

Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan negaranya (Inggris) pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional adalah penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern karena menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (*Gross National Product = GNP*) yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan setiap tahun oleh negara bersangkutan diukur menurut harga pasar yang berlaku di suatu negara.

Tujuan mempelajari perhitungan pendapatan nasional adalah sebagai berikut:

- (a) Untuk melihat kemajuan masyarakat dan negara dibidang perekonomian serta melihat pemerataan pembangunan bunga mencapai keadilan dan kemakmuran.
- (b) Untuk memperoleh taksiran yang akurat tentang nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama satu tahun.
- (c) Untuk mengkaji dan mengendalikan factor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu Negara.
- (d) Untuk membantu merencanakan dan melaksanakan program pembangunan berjangka guna mencapai tujuan pembangunan nasional.



Dalam konsep pendapat nasional dikenal beberapa konsep berikut:

1. Produk Nasional Bruto (PNB)

Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* meliputi nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada diluar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

2. Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (*Net National Income = NNI*) adalah pendapatan yang menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan dan pajak hadiah.

3. Pendapatan Perseorangan (PI)

Pendapatan Perseorangan (*Personal Income = PI*) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan Perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (*Transfer Payment*). *Transfer Payment* adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk memperoleh jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan

(pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu seperti keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh seriap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud akan dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

#### 4. Pendapatan yang Siap Dibelanjakan (DI)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (*Disposable Income* = DI) adalah pendapatan yang siap dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa, konsumsi, serta selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. *Disposable Income* (DI) diperoleh dari *Personal Income* (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (*direct tax*) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan ke pihak lain, artinya, harus langsung ditanggung oleh wajib pajak seperti pajak penghasilan.

##### 2.1.1. Metode Penghitungan Pendapatan Nasional

Untuk menghitung pendapatan nasional dapat digunakan tiga pendekatan berikut:

###### (a) Pendekatan Pendapatan

Menghitung pendapatan negara melalui pendekatan pendapatan dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Dalam menghitung pendapatan nasional pendekatan pengeluaran menggunakan rumus:

$$Y = w + r + i + p$$

Keterangan:

$Y$  = Pendapatan Nasional

$w$  = *Wage* (upah atau gaji)

$r$  = *Rent* (sewa)

$i$  = *Interest* (bunga)

$p$  = *Profit* (laba)

(b) Pendekatan Produksi

Menghitung pendapatan negara melalui pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).

$$Y = (P_1 \times Q_1) + (P_2 \times Q_2) + \dots + (P_n \times Q_n)$$

Keterangan :

$Y$  = Pendapatan nasional

$P_1$  = harga barang ke-1

$P_n$  = harga barang ke-n

$Q_1$  = jenis barang ke-1

$Q_n$  = jenis barang ke-n

(c) Pendekatan Pengeluaran

Menghitung pendapatan negara melalui pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan melalui pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan

oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu rumah tangga (*Consumption*), pemerintah (*Government*), pengeluaran investasi (*Investment*), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi nilai impor ( $X-M$ ). Dalam hal ini pendekatan pengeluaran menggunakan rumus berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah (*value added*). Jadi pada perhitungan pendekatan produksi, hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor (lahan) produksi. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah (*value added*) dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu (biasanya dalam satu tahun).

Nilai tambah yang dimaksud di sini adalah selisih antara nilai produksi (nilai output) dengan nilai biaya antara (nilai input), yang terdiri atas bahan yang terlibat dalam proses produksi termasuk bahan baku dan bahan penolong.

ISIC (International Standard Industrial Classification) mengklasifikasikan perekonomian Indonesia menjadi beberapa sektor atau lapangan usaha yang terbagi dalam tiga kelompok, diantaranya:

1. Sektor Primer

Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Pertambangan dan penggalan.

2. Sektor Sekunder

Industri pengolahan, Listrik, air, dan gas.

3. Sektor Tersier

Perdagangan, hotel, dan restoran, Pengangkutan dan telekomunikasi. Jasa lain-lain.

Jadi metode Pendekatan Produksi di rumuskan sebagai berikut:

$$Y=(P_1 \times Q_1)+(P_2 \times Q_2)+\dots+(P_n \times Q_n)$$

Keterangan :

Y= Pendapatan nasional

P<sub>1</sub>= harga barang ke-1

P<sub>n</sub>= harga barang ke-n

Q<sub>1</sub>= jenis barang ke-1

Q<sub>n</sub>= jenis barang ke-n

Dalam perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi ini ada satu hal penting yang harus diingat yaitu jangan sampai melakukan

penjumlahan berulang (multiple accounting) terhadap suatu produk baik barang maupun jasa. Oleh sebab itulah aspek yang harus dijumlahkan dalam perhitungan yakni nilai tambah (value added) suatu produk baik barang maupun jasa, bukan dilihat dari nilai akhirnya.

## **2..2. Peraturan Tentang Perikanan**

Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional. Selanjutnya sebagai konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of the Sea 1982 menempatkan Negara Kesatuan RI memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan taut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara

lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara berhati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

Undang-Undang No. 31 tahun 2001 ini di keluarkan atas dasar bahwa perairan yang berada dibawah kedaulatan dan yurisdiksi NKRI dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan iakn potensial yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memamfaatkannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pengelolaan sumber daya ikan di lakukan berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemamfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup nelayan, pembudidaya ikan, dan atau pihak yang terkaitb dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Undang-undang No 31 tahun 2004 tentang perikanan, di jelaskan bahwa pengelolaan sumberdaya perikanan seperti di jelaskan pada pasal 1 ayat 1 bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi,

produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dan pada ayat 7 yaitu bahwa Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Namun undang-undang no 31 tahun 2004 tentang perikanan di anggap belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengolahan dan pememfaatann potensi perikanan di Indonesia

Jadi hal tersebut yang membuat pemerintah menetapkan sebuah undang-undang No 45 tahun 2009 tentang perikanan yang semua kegiatannya berhubungan dengan pengolahan dan pememfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi,produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang di laksanakan dalam suatu bisnis perikanan.

Sebagai mana yang tertulis pada Pasal 14 ayat 1 bahwa Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumber daya ikan. Ayat 2 bahwa Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan. Pasal 25 ayat 1 bahwa Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.



Pada tahun 2016 pemerintah republik Indonesia mengeluarkan undang-undang terbaru tentang perikanan di Indonesia yaitu undang-undang republik Indonesia no. 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan para nelayan, pembudidaya ikan, dan petembak garam yaitu terdapat pada pasal 1 ayat 1.

### **2.3.Potensi Kinerja Pembangunan Kelautan**

Secara global, pertumbuhan ekonomi dunia yang secara agregat cenderung meningkat ternyata telah membawa implikasi kepada peningkatan aktivitas perekonomian di kawasan Asia Pasifik. World Economic Forum (WEF) pada konvensi di Swiss tahun 2001 yang lalu memprediksi bahwa kawasan ini akan menjadi *leader bagi* kawasan lain dalam kurun waktu hingga dua decade mendatang. Satu hal yang menarik, berdasarkan kajian WEF variabel terpenting dari pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut adalah sector kelautan yang akan menjadi *prime mover*. Indonesia sebagai Negara kepulauan yang besar yang berada di samping Filipina dan Jepang yang terletak di kawasan Asia Pasifik, di yakini oleh Bank Pembangunan Asia (*Asia Development Bank*) dan Bank Dunia (*World Bank*) dalam laporan tahunannya pada tahun 2000 akan memegang peranan kunci dalam pertumbuhan di kawasan ini sebagaimana prediksi WEF tersebut. Hal ini sangat beralasan mengingat studi yang dilakukan oleh PKSPL-IPB (2000) menunjukkan bahwa hingga tahun 1998, sector perikanan kelautan menyumbang 20,06% dari PDB nasional. Dalam hal ini pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan PDB dari perikanan, untuk mendorong hal tersebut pemerintah harus berupaya untuk menjaga kelautan dan sungai atau danau dari sampah yang akan merusak ekosistem ikan dan mengakibatkan kurangnya keberlangsungan kehidupan laut, danau dan sungai maka dari itu pemerintah

Indonesia mengajak masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai atau ke laut.

#### **2.4.Jenis-Jenis Perikanan Di Indonesia**

Perikanan merupakan salah satu mata pencaharian yang besar di Indonesia. Karena, Negara kita kaya akan potensi perikanan. selain memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang, Indonesia juga memiliki sumber air darat yang melimpah. Semua potensi tersebut dapat digunakan untuk mendukung sektor perikanan.

Berdasarkan jenis perairannya, usaha perikanan dapat dibedakan sebagai berikut.

##### **A.Perikanan Darat**

Perikanan darat merupakan usaha pembudidayaan atau penangkapan ikan yang dilakukan di daratan. Pembudidayaan perikanan darat dapat dilakukan di tambak, keramba, kolam, sungai, danau, waduk, dan lainnya,

Perikanan darat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

##### ➤ Perikanan Air Payau

Perikanan air payau dilakukan di tepi-tepi pantai yang datar dalam bentuk tambak atau empang. Jenis ikan yang diusahakan adalah udang dan bandeng

##### ➤ Perikanan Air Tawar

Perikanan air tawar meliputi perikanan di sawah, kolam, danau, sungai, dan keramba. Jenis-jenis ikan yang diusahakan adalah ikan mas, nila, lele, gurami.

Perikanan darat di Indonesia tersebar di beberapa pulau besar di Indonesia yaitu ;

- Sumatera: perikanan tambak atau empang di pantai utara Aceh; perikanan rawa pasang-surut di rawa-rawa pantai timur Sumatera; perikanan sungai di sungai-sungai Sumatera; perikanan danau di danau-danau Sumatera.
- Jawa: perikanan tambak, di pantai utara Jawa, pantai selatan atau barat Madura; perikanan kolam di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; perikanan danau dan sungai (hampir di seluruh Pulau Jawa).
- Sulawesi: tambak di pantai Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara pantai timur.
- Kalimantan: tambak di pantai barat dan selatan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur; perikanan sungai hampir di sungai-sungai seluruh Kalimantan.

## B. Perikanan Laut

Usaha pembudidayaan atau penangkapan hewan-hewan laut disebut dengan perikanan laut. Penangkapan hewan-hewan laut biasanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal di kawasan pesisir.

Nelayan biasanya menangkap hewan-hewan laut di kawasan laut-laut dangkal atau zona neritik. Secara tradisional, para nelayan biasanya menggunakan perahu-perahu kecil. Penangkapan besar-besaran biasanya menggunakan perahu motor yang besar. Jenis peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan sangat beragam, misalnya pancing, jala, jaring, sero, dan lainnya.

Potensi perikanan laut Indonesia sangat besar, karena hampir 60% wilayah Indonesia merupakan perairan laut. Jenis ikan yang dihasilkan antara lain tongkol, cucut, Ikan teri, ikan kembung, cumi-cumi, ikan kerapu, tuna dan lain sebagainya.

Pusat perikanan laut di Indonesia adalah:

- 1) Bagan Siapi-api (Riau) merupakan pelabuhan ikan terbesar di Indonesia.
- 2) Cilacap dan Tegal (Jawa Tengah)
- 3) Muncar (Banyuwangi, Jawa Timur)
- 4) Airtembaga (Sulawesi Utara).

Hasil penangkapan ikan, baik perikanan darat atau laut perlu diawetkan agar dapat bertahan lama. Cara-cara yang bisa dilakukan antara lain pendinginan, penggaraman, pemindangan, pengasapan, dan pengalengan. Untuk memilih yang kualitas ekspor untuk di ekspor keluar negeri.

## 2.5. Penelitian Terdahulu

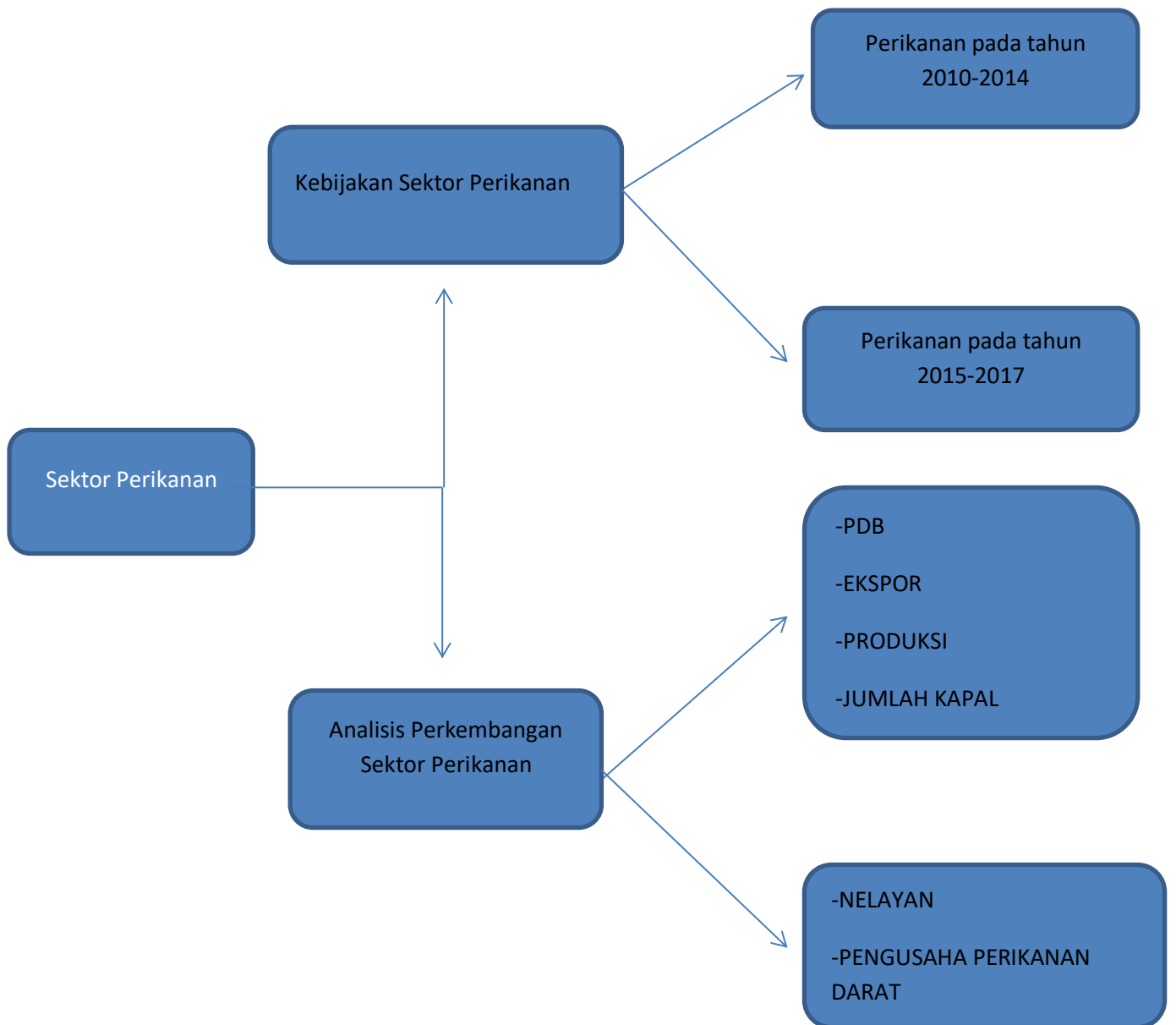
**Tabel 2.1.**

### Penelitian terdahulu

Nama Penelitian, Judul Penelitian	Metode Estimasi	Hasil Riset
Wiwit setiawati, analisis pengaruh faktor produksi industri pengasapan ikan di kota semarang	Regresi Linier Berganda	Ikan mentah berpengaruh positif dan signifikan, tungku berpengaruh secara positif tapi tidak signifikan, tempurung kelepa berpengaruh positif dan signifikan, dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi ikan asap.
Hendrik, Potensi Sumberdaya Perikanan dan Tingkat Eksploitasi (Kajian terhadap Danau Pulau Besar dan Danau Bawah Zamrud kabupaten siak provinsi RIAU)	Regresi Linier	1) Perkembangan jumlah alat tangkap setiap tahunnya mengalami peningkatan 2,3% dan penurunan CPUE sebesar 4,6%. 2) Jumlah produksi perikanan pada tahun 2010 sebesar 38.300 kg dengan <i>maximum Sustainable Yield (MSY)</i> sebesar 43.148,28

		<p>kg/tahun.artinya telah terjadi kelebihan tangkap(<i>over fishing</i>).</p> <p>3) Tingkat eksploitasi telah mencapai 89% dari MSY, dimana <i>effort</i> optimal sebesar 502,18 unit, sedangkan pada tahun 2010 jumlah <i>effort</i> telah mencapai angka 679,76 unit.</p>
<p>Mohtar Rasyid, Potensi Ekonomi Ikan dan produk perikanan Indonesia dalam Lingkup Masyarakat Ekonomi ASEAN</p>	<p><i>Indeks harfindahl</i> (IH) dan OLS (<i>Ordinary least square</i>)</p>	<p>Ekspor perikanan Indonesia terfokus pada Negara Maju, faktor luas pasar merupakan farktor yang sangat sensitif terhadap tingkat ekspor, sedangkan inflasi dan pertumbuhan ekonoi negara tujua tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor ikan indonesia</p>

## 2.6. Kerangka Konseptual



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu sebagai mana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2003:11) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Menurut Sugiyono (2003:14) Penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Berdasarkan teori tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian di analisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis tentang kebijakan pemerintah sub sector perikanan di Indonesia. Data yang disajikan adalah data dari tahun 2010 sampai 2017.

#### **3.2. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional merupakan acuan dari tujuan pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana variabel yang satu dengan yang lain berhubungan sehingga penelitian sesuai dengan yang diinginkan. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu :



**Tabel 3.1**

**Defenisi Operasional**

<b>Variabel</b>	<b>Defenisi Operasional</b>	<b>Sumber Data</b>
Sektor Perikanan	Kegiatan manusia yang berhubungan dengan pemamfaatan dan pengolahan sumberdaya hayati perairan, baik itu perikanan tangkap atau budidaya	BPS <a href="https://www.bps.go.id/">https://www.bps.go.id/</a>
PDB Sektor Perikanan	Jumlah nilai barang atau jasa yang diproduksi dalam sektor perikanan baik itu perikanan tangkap atau budidaya dalam periode waktu tahun 2010-2017	BPS <a href="https://www.bps.go.id/">https://www.bps.go.id/</a>

**3.3. Tempat Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini di lakukan di Sumatra Utara dengan melihat data PDB perikanan, ekspor perikanan dan permasalahan-permasalahan perikanan yang ada di Indonesia. Waktu penelitian ini di rencanakan selama 4 bulan yaitu Desember 2018 sampai Maret 2019.

**3.4. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini di lakukan dengan metode studi kepustakaan atau dokumentasi. Metode ini di maksudkan untuk memperoleh data sekunder yang telah di publikasikan melalui website resmi dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia yang berfungsi sebagai landasan teoritis untuk mendukung analisis terhadap data sekunder yang di peroleh selama penelitian.

Data yang penulis ambil adalah data PDB perikanan indonesia dan ekspor perikanan indonesia dari tahun 2010-2017 .

### **3.5.Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dalam melihat perkembangan sektor perikanan dan kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah terhadap kelautan dan perikanan di indonesia pada tahun 2010-2017.data di sajikan dalam bentuk tabel dan grafik.

## **BAB IV**

### **ANALISA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Geografi dan Demografi**

##### **4.1.1 Letak Geografis**

Secara geografis, Indonesia terletak di antara Benua Australia dan Benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra pasifik. Sedangkan secara astronomis, Indonesia terletak pada  $6^{\circ}$  LU (Lintang Utara)- $11^{\circ}$ LS (Lintang Selatan) dan  $95^{\circ}$ BT (Bujur Timur)- $141^{\circ}$  BT (Bujur Timur).dan menjadikan Indonesia terbagi atas 3 waktu yaitu Waktu Indonesia Timur (WIT),Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Barat (WIB). Dan Indonesia memiliki 2 musim yakni musim hujan dan musim kemarau.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dengan kepulauan terbesar di Dunia yang terdiri dari 17.504 pulau.dan sekitar 6000 pulau yang tidak berpenghuni yang menyebar di sekitar garis khatulistiwa. hal ini menjadikan Indonesia negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 2,01 juta km<sup>2</sup> daratan, 3,25 juta km<sup>2</sup> lautan, dan 2,55 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE),dan garis pantai yang sangat panjang lebih dari 81.000 km Negara Indonesia merupakan negara dengan luas perairan lebih besar dari pada luas daratan, sehingga disebut sebagai negara maritim.

Gambar 4.1.

Peta indonesia



Sumber : wikipedia indonesia

Luasnya wilayah Indonesia membuat negara ini memiliki batas-batas dengan banyak negara. Tercatat Indonesia memiliki batas daratan secara langsung dengan 3 negara, yakni Malaysia (sebelah utara) di Pulau Kalimantan, Papua Nugini (sebelah timur) di Pulau Papua, dan Timor Lester (sebelah selatan) di Pulau Timor. Selain itu setidaknya ada 7 negara yang memiliki batas laut di wilayah perairan dengan Indonesia. seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina serta dengan Laut Cina Selatan, Samudera Pasifik, Samudra Hindia . luasnya indonesia membuat wilayah indonesia terbagi atas 34 provinsi.

**Tabel 4.1.****Luas wilayah indonesia terbagi 34 provinsi**

<b>Nama Provinsi</b>	<b>Ibu Kota Provinsi</b>	<b>Luas (km)</b>	<b>Persentase Terhadap Luas Indonesia</b>	<b>Jumlah Pulau</b>
Aceh	Banda Aceh	57 956,00	3,03	663
Sumatera Utara	Medan	72 981,23	3,81	419
Sumatera Barat	Padang	42 012,89	2,20	391
Riau	Pekanbaru	87 023,66	4,55	139
Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	8 201,72	0,43	2 408
Jambi	Jambi	50 058,16	2,62	19
Sumatera Selatan	Palembang	91 592,43	4,79	53
Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang	16 424,06	0,86	950
Bengkulu	Bengkulu	19 919,33	1,04	47
Lampung	Bandar Lampung	34 623,80	1,81	188
DKI Jakarta	Jakarta	664,01	0,03	218
Jawa Barat	Bandung	35 377,76	1,85	131
Banten	Serang	9 662,92	0,50	131
Jawa Tengah	Semarang	32 800,69	1,71	296
DI Yogyakarta	Yogyakarta	3 133,15	0,16	23
Jawa Timur	Surabaya	47 799,75	2,50	287
Bali	Denpasar	5 780,06	0,30	85
Nusa Tenggara Barat	Mataram	18 572,32	0,97	864
Nusa Tenggara Timur	Kupang	48 718,10	2,55	1 192

Kalimantan Barat	Pontianak	147 307,00	7,70	339
Kalimantan Tengah	Palangka Raya	153 564,50	8,02	32
Kalimantan Selatan	Banjarmasin	38 744,23	2,02	320
Kalimantan Timur	Samarinda	129 066,64	6,74	370
Kalimantan Utara	Bulungan	75 467,70	3,94	-
Sulawesi Utara	Manado	13 851,64	0,72	668
Gorontalo	Gorontalo	11 257,07	0,59	136
Sulawesi Tengah	Palu	61 841,29	3,23	750
Sulawesi Selatan	Makassar	46 717,48	2,44	295
Sulawesi Barat	Mamuju	16 787,18	0,88	-
Sulawesi Tenggara	Kendari	38 067,70	1,99	651
Maluku	Ambon	46 914,03	2,45	1 422
Maluku Utara	Ternate	31 982,50	1,67	1 474
Papua	Jayapura	319 036,05	16,67	598
Papua Barat	Manokwari	99 671,63	5,21	1 945
Indonesia	Jakarta	1 913 578,68	100,00	17 504

*Sumber : bps indonesia*

#### **4.1.2.Kondisi Topografi Indonesia**

Indonesia sebuah negara yang rawan akan gempa karna Indonesia di lalui oleh tiga lempeng bumi aktif yaitu Lempeng Indo-Australia,Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik.sehingga negara Indonesia rentan akan gempa dan di Indonesia

juga banyak terdapat gunung aktif karna adanya lempeng bumi ini. Banyak dataran tinggi di Indonesia mulai dari pulau Sumatra Jawa Papua dan Sulawesi, seperti di pulau Sumatra yang di mulai dari Aceh Tengah sampai Sumatra Utara di Brastagi dan daerah lain di Sumatra, sedangkan di Jawa seperti daerah Dieng, Bromo dan daerah lainnya. di Papua sendiri di pengunungan Puncak Jaya Wijaya dan sekitarnya. Sedangkan dataran rendah Indonesia luas sekali dan ini menyambung ke garis pantai. Seperti di Sumatra daerah garis pantai Timur dan pantai Barat rata-rata semuanya adalah daerah dataran rendah, di Jawa juga begitu daerah Utara dan Selatan adalah dataran rendah dan di Kalimantan rata-rata daerahnya dataran rendah, begitu juga dengan Sulawesi dan Papua.

#### **4.1.3. Kondisi Demografi Indonesia**

Indonesia sebuah negara besar dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia setelah negara Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Dan Indonesia kaya akan suku dan budayanya. di Indonesia sendiri ada 300 kelompok etnik atau suku bangsa, atau lebih tepatnya 1340 suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. mulai dari suku Jawa yang dominan dengan jumlah terbesar populasinya di Indonesia tetapi banyak juga suku-suku lainnya yang ada di Indonesia. Dengan keanekaragaman suku di Indonesia tentu tidak menjadikan Indonesia itu salah satu faktor untuk membuat perpecahan justru itu membuat suatu yang mempersatu bangsa Indonesia sesuai dengan semboyan Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika walaupun berbeda beda tetap satu jua., dan Indonesia hidup harmonis berdampingan walaupun berbeda keyakinan, seperti mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam tetapi hidup rukun dengan agama lainnya seperti Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha dan Kong hu cu. Pada sensus

penduduk indonesia tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.641.326 jiwa, seperti yang ada di tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**  
**Indonesia**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
0-4	11.662.369	11.016.333	22.678.702
5-9	11.974.094	11.279.386	23.253.480
10-14	11.662.417	11.008.664	22.671.081
15-19	10.614.306	10.266.428	20.880.734
20-24	9.887.713	10.003.920	19.891.633
25-29	10.631.311	10.679.132	21.310.443
30-34	9.949.357	9.881.328	19.830.685
35-39	9.337.517	9.167.614	18.505.131
40-44	8.322.712	8.202.140	16.524.852
45-49	7.032.740	7.008.242	14.040.982
50-54	5.865.997	5.695.324	11.561.321
55-59	4.400.316	4.048.254	8.448.570
60-64	2.927.191	3.131.570	6.058.761
65-69	2.225.133	2.468.898	4.694.031
70-74	1.531.459	1.924.872	3.456.331
75-79	842.344	1.135.561	1.977.905
80-84	481.462	661.708	1.143.170
85-89	182.432	255.529	437.961
90-94	63.948	106.951	170.899
95+	36.095	68.559	104.654
<b>Jumlah</b>	<b>119.630.913</b>	<b>118.010.413</b>	<b>237.641.326</b>

*Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*

#### 4.1.4. Struktur Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Perubahan tersebut dapat dilihat dari perubahan



jumlah produksi yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi, yang merupakan suatu gambaran tingkat perubahan ekonomi suatu negara. Bagi setiap negara pasti tentu punya indikator tentang bagaimana kebijakan yang dilakukan pemerintahan itu mengalami peningkatan dalam waktu ke waktu. dan hal menjadikannya sebagai acuan buat meningkatkan ekonominya kedepannya dan untuk melihat perkembangan sektor apa yang harus di tingkatkan lagi dalam perekonomian Indonesia kedepannya.

Seperti halnya negara Indonesia dalam melihat perkembangan ekonominya Indonesia kita dapat melihatnya dari Perkembangan PDB Indonesia atas harga konstan. Terjadinya pertumbuhan PDB Indonesia karna adanya peningkatan dari sub-sektor PDRB dari tahun ke tahun atau meningkatnya kontribusi sub-sektor PDRB tersebut. Berikut ini PDB Indonesia dari tahun 2010-2017 atas harga konstan.

**Tabel 4.3**

**PDB Indonesia Tahun 2010-2017**

PDB INDONESIA SERI 2010 (MILYAR RUPIAH) HARGA KONSTAN 2010								
PDB LAPANGAN USAHA SERI 2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan
<b>A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	956119.70	993857.30	1039440.70	1083141.80	1129052.70	1171445.80	1210955.50	1257875.50
Jasa Pertanian	754434.40	780581.10	816304.40	847763.70	880389.50	906805.50	936356.90	969773.90
a. Tanaman Pangan	253326.60	250787.40	263076.20	268268.20	268426.90	280018.80	287216.50	293858.00
b. Tanaman Hortikultura	110395.30	120079.30	117424.50	118207.70	124300.90	127110.00	130832.30	135647.00
c. Tanaman Perkebunan	268207.30	281465.00	301019.50	319532.60	338502.20	345164.90	357137.70	373054.00
d. Peternakan	108399.90	113603.30	119249.80	125302.30	132221.10	136936.40	143036.50	148357.10
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	14105.30	14646.10	15534.40	16452.90	16938.40	17575.40	18133.90	18857.80
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	58125.90	58731.00	58872.00	59228.80	59573.50	60623.50	60002.00	61250.60
3. Perikanan	143559.40	154545.20	164264.30	176149.30	189089.70	204016.80	214596.60	226851.00
<b>B. Pertambangan dan Penggalian</b>	718128.60	748956.30	771561.60	791054.40	794489.50	767327.20	774593.10	779678.40
Bumi	336169.70	335737.10	323632.40	313328.10	307161.70	307325.80	313743.90	302653.00
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	160732.50	199244.00	230589.20	247594.60	251073.60	232725.30	223098.60	226478.90
3. Pertambangan Bijih Logam	109244.20	95413.70	91614.50	98608.60	98257.90	87702.90	89303.20	95150.40
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	111982.20	118561.50	125725.50	131523.10	137996.30	139573.20	148447.40	155396.10
<b>C. Industri Pengolahan</b>	1512760.80	1607452.00	1697787.20	1771961.90	1854256.70	1934533.20	2016876.90	2103466.10
Migas	233822.20	233051.90	227456.10	221449.90	216750.80	214312.00	220392.10	219849.40
Industri Pengolahan Non Migas	1278938.60	1374400.10	1470331.10	1550512.00	1637505.90	1720221.20	1796484.80	1883616.70

1. Industri Makanan dan Minuman	360443.10	400003.70	441341.70	459283.00	502856.20	540756.40	585786.30	639834.40
2. Industri Pengolahan Tembakau	67249.40	67096.80	73011.40	72814.00	78878.70	83798.70	85119.70	84572.40
3. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	96306.90	102561.10	108753.60	115913.10	117723.40	112078.90	111978.20	116261.60
Alas Kaki	19697.20	21852.30	20665.30	21745.70	22967.70	23879.20	25875.30	26449.00
Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu,	56775.10	55230.90	54786.90	58180.60	61742.50	60735.40	61790.60	61870.40
Percetakan dan Reproduksi Media	67984.80	70631.60	68590.40	68229.40	70670.10	70556.80	72399.90	72640.60
7. Industri Kimia, Farmasi dan Obat								
Tradisional	114332.40	124230.70	140101.80	147248.60	153191.90	164843.00	174469.80	182380.20
Plastik	66763.00	68152.60	73307.40	71945.70	72777.30	76442.10	69940.90	71666.80
9. Industri Barang Galian bukan Logam	50948.30	54909.80	59252.40	61228.70	62706.80	66485.20	70118.70	69512.90
10. Industri Logam Dasar	54471.50	61859.70	60888.70	67972.40	72059.10	76532.10	77293.00	81832.60
11. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan	130750.50	142245.00	158803.50	173452.40	178544.20	192528.00	200860.90	206469.30
12. Industri Mesin dan Perlengkapan	23767.20	25794.50	25436.70	24163.80	26259.70	28250.50	29676.60	31325.00
13. Industri Alat Angkutan	134260.20	142815.20	148905.40	171165.50	178022.50	182289.10	190523.40	197527.90
14. Industri Furnitur	20069.30	22061.80	21588.50	22375.40	23179.90	24377.40	24489.80	25383.70
Reparasi dan Pemasangan Mesin dan	15119.70	14954.40	14897.40	14793.70	15925.90	16668.40	16161.70	15889.90
<b>D. Pengadaan Listrik dan Gas</b>	72549.10	76678.10	84393.00	88805.10	94047.20	94894.80	100009.90	101551.30
1. Ketenagalistrikan	58866.50	63384.50	70826.50	75050.70	79581.50	81407.00	86580.30	88663.40
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	13682.60	13293.60	13566.50	13754.40	14465.70	13487.80	13429.60	12887.90
<b>Limbah dan Daur Ulang</b>	5848.50	6125.10	6329.80	6539.90	6882.50	7369.00	7634.60	7986.10
<b>F. Konstruksi</b>	626905.40	683421.90	728226.40	772719.60	826615.60	879163.90	925040.30	987924.90
<b>Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	923923.80	1013199.60	1067911.50	1119272.10	1177297.50	1207164.50	1255760.80	1311762.50
dan Reparasinya	182140.50	190877.70	203430.90	218291.10	229228.40	229967.50	239089.30	250549.40
Mobil dan Sepeda Motor	741783.30	822321.90	864480.60	900981.00	948069.10	977197.00	1016671.50	1061213.10
<b>H. Transportasi dan Pergudangan</b>	245375.40	265774.00	284662.60	304506.20	326933.00	348855.90	374843.40	406679.40
1. Angkutan Rel	2374.70	2297.90	2201.70	2336.90	2823.10	2948.60	3050.60	3630.20
2. Angkutan Darat	135485.60	145018.60	155851.80	167559.50	180367.40	192631.00	206218.10	222587.30
3. Angkutan Laut	21715.30	23541.50	25600.80	27372.40	29473.70	30174.00	30550.90	31969.10
Penyeberangan	8113.10	8813.30	9057.00	9469.20	10117.60	10222.20	10371.90	10995.10
5. Angkutan Udara	38304.20	43917.40	47030.30	49263.20	52255.10	57671.80	65295.40	73084.20
Angkutan; Pos dan Kurir	39382.50	42185.30	44921.00	48505.00	51896.10	55208.30	59356.50	64413.50
<b>Minum</b>	200281.80	214022.00	228232.60	243748.30	257815.50	268922.40	282823.40	298079.40
1. Penyediaan Akomodasi	35764.30	39784.90	43567.40	47699.60	51426.70	54340.30	57440.80	60344.10
2. Penyediaan Makan Minum	164517.50	174237.10	184665.20	196048.70	206388.80	214582.10	225382.60	237735.30
<b>J. Informasi dan Komunikasi</b>	256048.10	281693.80	316278.70	349150.10	384475.60	421769.80	459208.10	503420.80
<b>K. Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	239728.40	256443.00	280896.10	305515.10	319825.50	347269.00	378279.40	398959.30
1. Jasa Perantara Keuangan	149842.70	158503.70	175168.10	192098.00	197712.20	216631.20	237896.40	246031.80
2. Asuransi dan Dana Pensiun	51410.50	55801.80	60045.00	64661.30	69794.60	74398.10	79292.80	86687.90
3. Jasa Keuangan Lainnya	32701.70	35860.20	38867.70	41371.70	44464.70	48013.80	52472.80	57272.10
4. Jasa Penunjang Keuangan	5773.50	6277.30	6815.30	7384.10	7854.00	8225.90	8617.40	8967.50
<b>L. Real Estate</b>	198213.50	213441.40	229254.20	244237.50	256440.20	266979.60	279500.50	289730.40
<b>M,N. Jasa Perusahaan</b>	99085.40	108239.30	116293.30	125490.70	137795.30	148395.50	159321.70	172763.80
<b>Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</b>	259646.10	276336.80	282235.30	289448.90	296329.70	310054.60	319965.00	326570.70
<b>P. Jasa Pendidikan</b>	201559.50	215029.10	232704.30	250016.20	263685.00	283020.10	293887.60	304762.10
<b>Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	66444.70	72592.10	78380.10	84621.40	91357.10	97465.80	102490.20	109504.10
<b>R,S,T,U. Jasa lainnya</b>	101061.00	109372.40	115675.40	123083.10	134070.10	144904.20	156507.50	170177.30
<b>A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR</b>	6683679.80	7142634.20	7560262.80	7953312.30	8351368.70	8699535.30	9097697.90	9530892.10
<b>B. PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK</b>	180453.30	145001.10	166820.60	203185.50	213497.90	282981.80	336915.50	381811.50
<b>C. PRODUK DOMESTIK BRUTO</b>	6864133.10	7287635.30	7727083.40	8156497.80	8564866.60	8982517.10	9434613.40	9912703.60

Sumber: BPS Indonesia

Dari tabel PDB di atas kita dapat melihat bahwa peningkatan PDB dari tahun 2010-2017 terus mengalami peningkatan yang begitu besar. Pada tahun 2010 PDB Indonesia berjumlah 6864133.10 milyar rupiah dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2017 berjumlah 9912703.60 milyar rupiah. Dan penyumbang kontribusi terbesar PDB Indonesia yaitu pada bagian sektor industri dan pengolahan. Kontribusi dari industri dan pengolahan pada tahun 2010 sebesar 1512760.80 milyar rupiah sampai tahun 2017 mencapai 2103466.10 milyar rupiah. Dan begitu halnya dengan bidang pertanian, perkebunan, perikanan juga mengalami peningkatan seperti pada tahun 2010 sebesar 956119.70 milyar rupiah sampai 2017 berkontribusi sebesar 1257875.50 milyar rupiah. dan tentu setiap sektor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tidak terkecuali dari sektor perikanan. dari tabel di atas tentu kita dapat melihat peningkatan sektor perikanan yang begitu besar dari tahun ke tahun seperti pada tahun 2010 sektor perikanan menyumbangkan sebesar 143559.40 milyar rupiah dan sampai pada tahun 2017 mencapai sebesar 226851.00 milyar rupiah.

## **4.2. Analisis Komparatif Kebijakan Ekonomi Sub-Sektor Perikanan di Indonesia Pada Tahun 2010-2017**

### **4.2.1. Kebijakan Perikanan Pada Tahun 2010-2014**

Perikanan di Indonesia tidak terlepas dari adanya dorongan pemerintah terhadap peningkatan dan kemajuan perikanan di Indonesia. melalui kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia. Baik itu PERPU( Peraturan Perundang Undangan), PERPRES( Peraturan Presiden ) dan Peraturan kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini peraturan yang di keluarkan

adalah salah satu cara untuk meningkatkan sektor perikanan di Indonesia. Pada tahun 1982 Konvensi Hukum Laut mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian. Untuk saat ini telah ada 158 negara, termasuk Uni Eropa, telah bergabung dalam konvensi. Berdasarkan kesepakatan tersebut wilayah perairan Indonesia meliputi batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Jadi atas dasar hukum itu pemerintah Indonesia mulai mengembangkan sektor perikanan Indonesia baik tangkap atau budidaya.

Undang-undang No 31 Tahun 2004 tentang perikanan, di jelaskan bahwa pengolahan sumberdaya perikanan seperti di jelaskan pada pasal 1 ayat 1 bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan pemamfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai praproduksi , produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang di laksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Pada pemerintahan bapak SBY-Boediono pada tahun 2010-2014, pada masa ini pemerintahan terus berupaya meningkatkan sektor perikanan di Indonesia. Terlihat adanya di keluarkan PERPRES pada tahun 2010, karna banyaknya di wilayah kepulauan Riau perkara tindak pidana di bidang perikanan. Pasal 1 Membentuk Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri

Ranai. Pasal 2 Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana di bidang perikanan pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Rana.

pemerintah mengeluarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia Tahun 2010-2014. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 -2014.

Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung kebijakan nasional dalam 5 tahun ke depan tersebut adalah :

1. *Pro poor* Pendekatan *Pro-poor* dilakukan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.
2. *Pro job* Pendekatan *Pro-job* dilakukan melalui optimalisasi potensi perikanan budidaya yang belum tergarap untuk menurunkan tingkat pengangguran nasional. Usaha membuka lapangan kerja diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan kepastian berusaha.
3. *Pro growth* Pendekatan *pro-growth* dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional melalui transformasi pelaku ekonomi kelautan dan perikanan, dari pelaku

ekonomi subsisten menjadi pelaku usaha modern, melalui berbagai dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan modernisasi.

4. *Pro sustainability* Pendekatan *pro-sustainability* dilakukan melalui upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim

Dalam mewujudkan hal tersebut kementerian kelautan dan perikanan mengeluarkan keputusan menteri perikanan pada tahun 2013 tentang penetapan kawasan minapolitan. adapun keputusan tersebut untuk memajukan perikanan budidaya di Indonesia. Dalam keputusan kementerian kelautan dan perikanan salah satunya yaitu pertama menetapkan 179 kabupaten/kota sebagai kawasan minapolitan pada 33 provinsi. kedua kawasan minapolitan sebagai mana di maksud diktum kesatu terdiri dari 202 lokasi minapolitan dengan penggerak/kegiatan utama sebanyak 145 perikanan budidaya dan 57 perikanan tangkap. Semua peraturan itu di buat untuk meningkatkan perikanan di indonesia baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

#### **4.2.2. Kebijakan Perikanan Pada Tahun 2014-2017**

Pada tahun 2014 yaitu tahun pertama yang di pimpin oleh Bapak Jokowi Widodo bertekad memperkuat pengawasan perairan Indonesia karna kita tahu sendiri masih kurangnya pengawasan dan sanksi terhadap pelaku pencurian ikan di indonesia pada pemerintahan ini melalui kementerian kelautan dan perikanan mengeluarkan sebuah kebijakan yang begitu tegas demi melindungi perairan Indonesia. Yaitu melalui kebijakan yang kita tahu yaitu barang siapa yang melanggar dan mencuri ikan di perairan Indonesia akan di tenggelamkan.

Pemerintah, sebenarnya bukan tanpa tindakan. Pasal 69 ayat (4) dalam Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan memiliki serangkaian payung hukum terkait penegakan hukum terhadap tindakan *illegal fishing*, salah satunya adalah dimungkinkannya dilakukan penenggelaman kapal yang terbukti melakukan pengangkapan ikan tanpa izin.

Sayangnya sudah 5 tahun sejak keberlakuan regulasi ini, belum pernah dimaksimalkan oleh pemerintah dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairannya. Beberapa kendala yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi dari instansi-instansi yang memiliki kewenangannya masing-masing, misalnya TNI AL, Polisi Air, Kapal Pengawas Perikanan (di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan), sampai Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (di bawah Kementerian Perhubungan), yang menggunakan prinsip *multi agency multi task*.

Walaupun di atas kertas setiap instansi memiliki peranan yang berbeda, dalam praktik sering terjadi tumpang tindih kewenangan, sehingga terjadi kebingungan dalam hal melaksanakan penegakan hukum. Hal ini jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran dan konflik antar instansi pemerintah, yang hal tersebut pantang terjadi jika ingin mempertahankan laut Indonesia.

Sehingga dirasa perlu untuk menciptakan suatu koordinasi antar instansi demi terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan hukum. Sebenarnya, melalui Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2005, telah dibentuk Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) sebagai upaya menciptakan harmonisasi dalam koordinasi antar instansi dalam pengamanan dan

penegakan hukum di laut. Sayangnya kewenangan “koordinasi” yang diberikan terlampau lemah sehingga pada akhirnya tidak memberi pengaruh apapun.

Badan Keamanan Laut dan Peranannya dalam Membasmi *Illegal Fishing* juga terdapat pada Pasal 59 ayat (3) pada UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut. Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah Presiden, yang memiliki tugas utama yakni melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Pada dasarnya, Bakamla merupakan revitalisasi dari Bakorkamla, yang telah dikuatkan kewenangannya, yakni menjadi sentral komando penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, berbeda dengan Bakorkamla yang hanya mengkoordinir instansi terkait.

Pada tahun 2015 mengeluarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tentang Satuan Tugas Pencegahan Dan Pemberantasan *Illegal, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING*. Yaitu tentang betapa pentingnya peranan pengawasan perikanan di Indonesia. dan pada tahun 2015 ini juga kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan larangan tentang penggunaan alat tangkap sebagai mana yang tercantum dalam PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik DI Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.



### **4.2.3 Perkembangan Sektor Perikanan di Indonesia.**

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan posisi silangnya yang sangat strategis. Terletak di antara dua benua dan dua samudera. Luas kepulauan Indonesia adalah 9,8 juta  $km^2$  (seluruh wilayah Indonesia), dan luas wilayah lautnya 7,9 juta  $km^2$ . Posisi silang yang sangat strategis menyebabkan Indonesia mempunyai peranan penting dalam lalu lintas laut, tetapi posisi silang disamping menguntungkan juga membahayakan bagi negara, baik dalam bidang sosial ekonomi, kebudayaan, maupun pertahanan dan keamanan.

Indonesia membuat peraturan yang jelas dan tegas mengenai batas wilayah perairan laut negara Republik Indonesia, agar bahaya-bahaya yang mungkin timbul dapat dicegah. Indonesia menganut persetujuan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati pada tahun 1982. Berdasarkan kesepakatan tersebut wilayah perairan Indonesia meliputi batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif.

#### **1. Batas Laut Teritorial**

Batas laut teritorial adalah suatu batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung terluar pulau di Indonesia. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar merupakan laut pedalaman. Di dalam batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintahan Indonesia.

#### **2. Bata Landas Kontinen**

Landas kontinen adalah dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Kedalaman landas kontinen tidak lebih dari 150 meter. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil. Kalau ada dua negara yang berdampingan mengusai laut dalam satu landas kontien dan jaraknya kurang dari 400 mil, batas kontinen masing-masing negara ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing. Kewajiban negara ini adalah tidak mengganggu lalu lintas pelayaran damai di dalam batas landas kontinen.

### 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi Juanda yang melahirkan Wawasan Nusantara. Di dalam deklarasi itu ditentukan bahwa batas perairan wilayah Indonesia adalah 12 mil dari garis dasar pantai masing-masing pulau sampai titik terluar.

Pada tanggal 21 Maret 1980 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indoensia sepanjang 200 mil, diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Pada zona ini Indonesia memiliki hak untuk segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam permukaan laut, di dasar laut, dan di bawah laut serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut lainnya.

Berikut ini batas-batas wilayah Indonesia di Utara, Barat, Timur, dan Selatan.

1. Batas wilayah Indonesia di Utara : Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya disebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan satu dari tiga negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina.

2. Batas wilayah Indonesia di Barat : Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia disebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak dititik-titik tertentu disekitar Samudera Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.

3. Batas wilayah Indonesia di Timur : Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua New Guinea dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua New Guinea telah menyepakati hubungan bilateral antar kedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia sebelah timur, yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua New Guinea sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun).

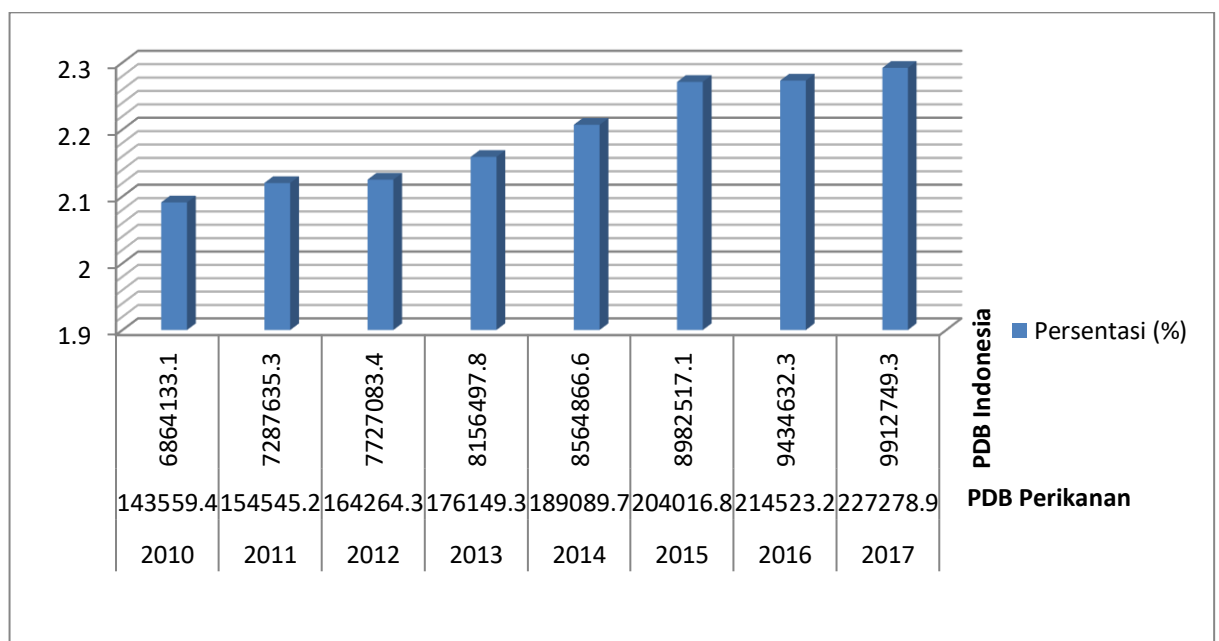
4. Batas wilayah Indonesia di Selatan : Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri

menjadi negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Di awal tahun 1997, kedua negara ini telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas landas kontinen.

Dengan demikian PDB perikanan Indonesia harusnya dapat berkontribusi besar pada PDB Indonesia, berikut kontribusi perikanan Indonesia:

**Grafik 4.1**

**Produk Domestik Bruto Perikanan Indonesia Dengan Harga konstan Tahun 2010-2017 (Milyar Rupiah)**



Sumber: BPS Indonesia

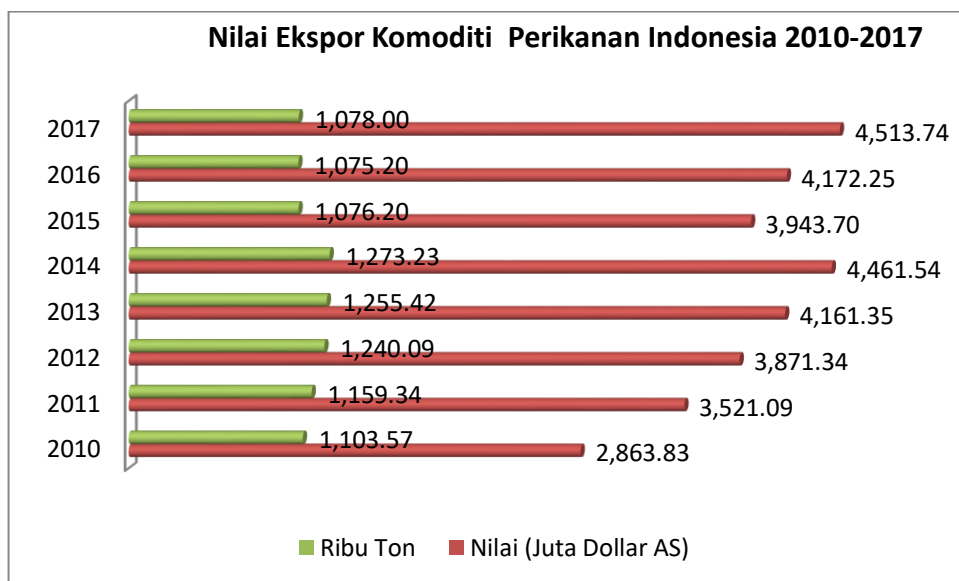
pada grafik di atas dapat kita lihat bahwa PDB Perikanan Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDB Indonesia tetapi

kontribusinya tidak begitu besar bagi PDB Indonesia. seperti pada tahun 2010 PDB perikanan hanya mampu berkontribusi sebesar 2,091% terhadap PDB Indonesia atau hanya dapat berkontribusi sebesar 143559.4 milyar rupiah dari PDB Indonesia yang mencapai 6864133.1 milyar rupiah. Pada tahun 2011 PDB perikanan mengalami peningkatan dari tahun 2010 walaupun tidak begitu besar yaitu 2,120 % atau menyumbang sebesar 154545.2 milyar rupiah dari jumlah PDB Indonesia yang mencapai sebesar 7287635.3 milyar rupiah. Dalam hal ini PDB Perikanan mengalami peningkatan sebesar 10985.8 milyar rupiah dari tahun 2010. pada tahun 2012 PDB Perikanan menyumbang kontribusinya terhadap PDB Indonesia sebesar 164264.3 milyar rupiah, atau mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 9719.1 milyar rupiah setara dengan 2,125 %. Pada tahun 2013 PDB Perikanan berkontribusi sebesar 176149.3 atau meningkat dari tahun 2012 sebesar 11885 milyar rupiah atau naik menjadi 2,159%.. Pada tahun 2014 ini PDB perikanan mengalami peningkatan kontribusinya terhadap PDB Indonesia yaitu sebesar 189089.7 atau sebesar 2,207 % dari PDB Indonesia. Dalam hal ini peningkatan PDB perikanan dari tahun 2013 ke tahun 2014 hanya sebesar 12940.4 milyar rupiah. Di tahun 2015 yaitu di mana di sini adanya kebijakan Presiden Joko Widodo yaitu dengan berlakunya peraturan presiden tentang pengawasan perairan Indonesia dan *Illegal Fishing* serta di keluarkannya peraturan menteri kelautan dan perikanan tentang penangkapan kapal *Illegal Fishing* dan penenggelaman kapal. Pada tahun ini kontribusi PDB perikanan mengalami peningkatan terhadap PDB Indonesia sebesar 204016.8 milyar rupiah jika di persentasekan PDB perikanan dapat menyumbang sebesar 2,271 % atau mengalami peningkatan sebesar 14927.1 milyar rupiah dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2016 PDB perikanan hanya mampu berkontribusi sebesar 214523.2 milyar rupiah atau berkontribusi sebesar 2,273 % dari PDB Indonesia, dan pada tahun 2017 PDB Indonesia mencapai sebesar 99122749.3 sedangkan PDB perikanan hanya mampu berkontribusi sebesar 227278.9 milyar rupiah atau sebesar 2,292 % dari PDB Indonesia di tahun 2017 ini. dalam hal ini tentu juga tidak lupa mendorong nilai ekspor perikanan Indonesia.

Perkembangan ekspor perikanan di Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2017 dapat kita lihat pada grafik di bawah ini:

**Grafik 4.2**



*Sumber: BPS Indonesia*

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa ekspor perikanan Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 sampai pada tahun 2014 ekspor perikanan Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. pada tahun 2010 ekspor perikanan Indonesia mencapai 1.103,57 ribu ton dengan nilai mencapai 2.863,83 juta USD. dan pada tahun 2011 naik menjadi 1.159,34 ribu ton

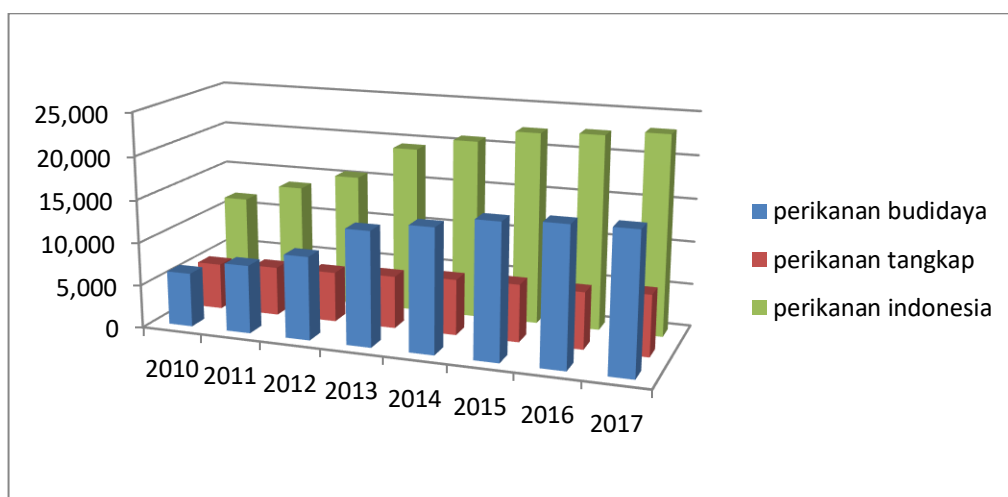
dengan nilai 3.521,09 juta USD, dan dari jumlah ekspornya mengalami kenaikan. Tetapi hal ini naik begitu besar yang terjadi pada nilainya karna adanya kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar yaitu pada tahun 2010 USD masih di kisaran 8.991,00 rupiah dan pada tahun 2011 USD mencapai 9.068.00 rupiah dan pada tahun ini peningkatan di pada volume ekspornya juga meningkat. dan pada tahun 2012 ekspor perikanan Indonesia mencapai 1.240,09 ribu ton dengan nilai 3.871,34 juta USD. Dan pada tahun ini USD mencapai 9.670,00 rupiah. dan pada tahun 2013 ekspor perikanan naik menjadi 1.255,42 ribu ton, dengan nilai 4.161,35 juta dollar. Tetapi rupiah juga melemah pada tahun ini yaitu 12.189.00 rupiah per USD nya. Pada tahun 2014 sektor perikanan juga mengalami peningkatan dari segi volume ekspor maupun nilainya yaitu dengan volume ekspor sebesar 1.273.23 ribu ton dan nilainya sebesar 4.461,54 juta dollar. Dan rupiah tahun ini juga melemah yaitu 12.440,00 rupiah per dollarnya. Sedangkan pada tahun 2015 ini ekspor perikanan mengalami penurunan yang cukup besar baik dari segi volume ekspornya dan nilainya. Pada volume ekspor perikanan pada tahun 2015 ini hanya sebesar 1.076,20 ribu ton dengan nilai mencapai 3.943,70 juta USD. dan pada tahun ini rupiah melemah sampai pada 13.795,00 rupiah per USD nya. dan pada tahun 2016 nilai ekspor perikanan mengalami kenaikan yaitu 4.127,25 juta USD dan volume ekspor pada tahun ini mengalami penurunan sedikit yaitu 1.075,20 ribu ton tetapi pada tahun ini juga rupiah mengalami penguatan rupiah terhadap dollar yaitu 13.436,00 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 ekspor perikanan naik begitu besar dari segi nilainya yang mencapai sebesar 4.513,74 juta dollar dan hal ini sektor perikanan menyumbang ekspor terbesar dari segi nilai selama 7 tahun terakhir. volume ekspor pada tahun

ini naik hanya sedikit atau sebesar 1.078,00 ribu ton saja pada tahun ini. Tetapi kita lihat lagi dari segi nilai tukar rupiah mengalami pelemahan yaitu sebesar 13.548,00 rupiah per dollar. Jadi ekspor perikanan ini kita lihat kenaikan dari sisi nilai mengalami peningkatan tetapi jumlah ekspor atau volumenya menurun itu disebabkan dari adanya pengaruh nilai tukar rupiah terhadap USD, karena dalam neraca perdagangan kita hanya menggunakan alat tukar USD sebagai pembayarannya.

Dari ekspor di atas tentunya tidak lupa dari produksi perikanan Indonesia yang begitu berpengaruh terhadap ekspor tersebut, dan produksi perikanan ini terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. perkembangan produksi perikanan di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2017 dapat kita lihat pada grafik di bawah ini:

**Grafik 4.3**

**Produksi Perikanan Indonesia (Ribu Ton)**



Sumber: BPS Indonesia



Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa produksi perikanan Indonesia terus meningkat baik dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap memang terus meningkat dari tahun ke tahun begitu juga dengan perikanan budidaya tetapi pada produksi perikanan Indonesia masih unggul di bidang perikanan budidaya yang begitu jauh berkontribusi terhadap produksi perikanan di Indonesia. Pada tahun 2010 saja produksi perikanan Indonesia mencapai 11.662 ribu ton, yang terdiri dari 6.278 ribu ton dari perikanan budidaya dan 5.384 ribu ton perikanan tangkap. Pada tahun 2011 sampai 2014 produksi perikanan Indonesia mengalami kenaikan hal ini tidak terlepas dari kebijakan kementerian kelautan dalam lima tahun kedepan yakni tentang pengembangan perikanan budidaya dan penyerapan npengangguran dari perikanan budidaya dan pengusaha perikanan yang lebih modern lagi. Dalam hal ini produksi perikanan terus di genjot dari sektor budidaya, dan tak lupa perikanan tangkap juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 produksi perikanan Indonesia mencapai 13.643 ribu ton yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 5.714 ribu ton dan perikanan budidaya sebesar 7.929 ribu ton dan pada tahun 2012 perikanan Indonesia mencapai sebesar 15.505 ribu ton yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 5.829 ribu ton dan perikanan budidaya sebesar 9.676 ribu ton. dan produksi 2013 sebesar 19.406 ribu ton dan terdiri dari perikanan tangkap 6.105 ribu ton dan perikanan budidaya sebesar 13.301 ribu ton. Hal ini terjadi peningkatan yang begitu signifikan pada tahun 2013 ini terhadap perikanan budidaya di karnakan adanya penetapan tentang minapolitan yang begitu besar yakni 202 lokasi minapolitan dengan penggerak/kegiatan utama sebanyak 145 perikanan budidaya dan tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Dengan

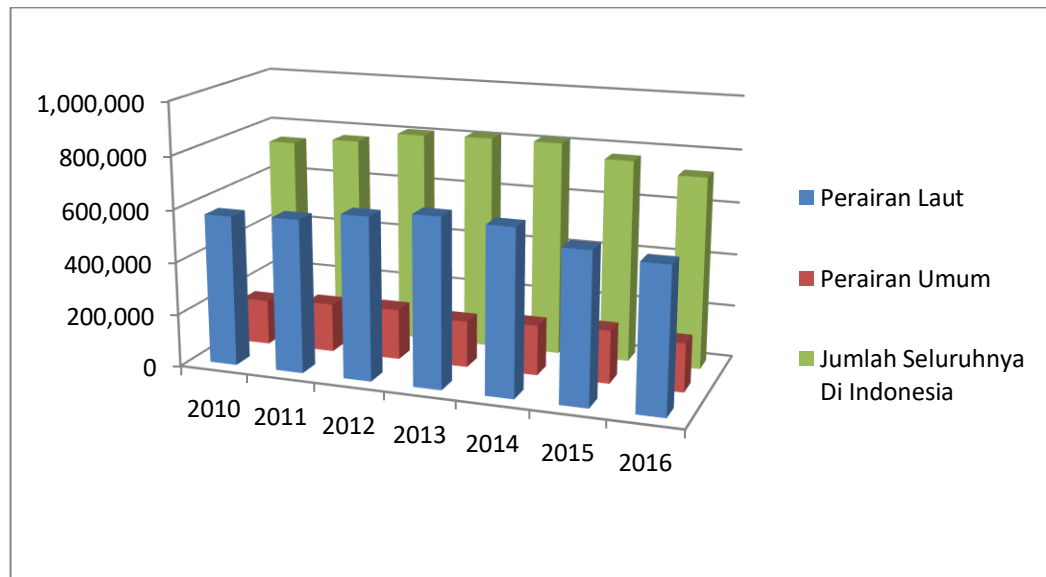
pengembangan minapolitan ini perikanan Indonesia terus meningkat terlihat Pada tahun 2014 produksi perikanan naik yaitu 20.834 ribu ton yang terbagi dari perikanan tangkap sebesar 6.484 ribu ton dan perikanan budidaya sebesar 14.359 ribu ton. Dan pada tahun 2015 produksi perikanan Indonesia mencapai 22.312 ribu ton yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 6.678 ribu ton dan perikanan budidaya yaitu 15.634 ribu ton.pada tahun 2016 produksi perikanan Indonesia mencapai 22.583 ribu ton yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 6.580 ribu ton dan perikanan budidaya sebesar 16.002 ribu ton.dan tahun 2017 produksi perikanan mencapai 23.186 ribu ton dan terdiri dari perikanan tangkap sebesar 7.071 ribu ton dan perikanan budidaya sebesar 16.114 ribu ton. Perikanan tangkap dalam hal ini peningkatannya cukup lambat di karnakan kita tahu bahwa perikanan tangkap yang yang langsung di tangkap di lautan lepas terkadang cuaca tidak begitu bersahabat pada nelayan dan mengakibatkan nelayan terkadang tidak dapat melaut dan perikanan tangkap juga tidak terlepas dari berkurangnya pertumbuhan perkembangbiakan perikanan di laut lepas karna di eksploitasi secara terus menerus.

Hal ini membuat perikanan tangkap tidak begitu signifikan kenaikannya,dalam perikanan tangkap tentu tidak terlepas dari nelayan-nelayan yang begitu hebat dalam mengarungi lautan dan mencari ikan di lautan. Hal ini tentu tentu tidak terlepas dari kapal/perahu nelayan yang berperan begitu penting dalam kehidupan para nelayan untuk mendapatkkan ikan. Kapal/Perahu nelayan di Indonesia terbagi atas tiga yaitu perahu tanpa motor ,perahu motor tempel dan kapal motor. Dalam hal ini kapal/perahu ini sebagai alat penunjang kegiatan perikanan tangkap baik perairan umum maupun perairan laut. Berikut tabel

jumlah kapal/Perahu nelayan di indonesia mulai tahun 2010 sampai 2016 baik perairan umum maupun perairan laut sebagai berikut:

**Grafik 4.4**

**Tabel Jumlah Kapal/Perahu Nelayan Di Indonesia tahun 2010-2016**



*Sumber: BPS Indonesia*

Dari tabel di atas tentu kita melihat begitu banyak kapal/ perahu nelayan yang ada di Indonesia ini baik di perairan laut maupun perairan umum. di tahun 2010 jumlah kapal/perahu yang ada di perairan laut berjumlah 570.827 kapal dan perairan umum sebanyak 171.542 kapal/perahu dengan jumlah kapal seluruh Indonesia pada tahun ini berjumlah 742.369 kapal/perahu dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan di perairan laut dan perairan umum hal ini di karnakan adanya rencana strategis pemerintah dalam 5 tahun kedepan di sektor perikanan yang di keluarkan pada periode 2010-2014 dijabarkan dalam enam kegiatan, yaitu: (1) Pengelolaan SDI, (2) Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat

penangkap ikan, dan pengawakan kapal perikanan, (3) Pengembangan, pembangunan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan, (4) Pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan, (5) Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil, dan (6) Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. pada tahun ini jumlah kapal di Indonesia sebanyak 767.187 kapal/perahu dengan perairan laut sebanyak 581.845 kapal/perahu dan perairan umum sebanyak 185.342 kapal/perahu. tahun 2012 jumlah kapal/perahu di Indonesia berjumlah 808.775 kapal/perahu yang terbagi atas perairan umum sebanyak 192.085 kapal/perahu dan perairan laut sebanyak 616.690 kapal/perahu. tahun 2013 jumlah kapal meningkat sebanyak 815.358 kapal/perahu yang ada di Indonesia dan perairan laut sebanyak 639.708 kapal/perahu dan perairan umum sebanyak 175.650 kapal/perahu. di tahun 2014 jumlah kapal/perahu juga mengalami peningkatan yaitu sebanyak 815.544 kapal/perahu yang ada di Indonesia yang terbagi atas perairan laut sebanyak 625.633 kapal/perahu dan perairan umum sebanyak 189.911 kapal/perahu. di 5 tahun terakhir ini juga adanya kemudahan mendapatkan bahan bakar dan harga yang relatif stabil. di tahun 2015 ini mengalami penurunan yang cukup besar karna pada tahun ini adanya larangan penangkapan kapal yang berbobot besar dan adanya larangan jaring pengkapan ikan seperti Pukat helai dan cantrang. di tahun ini banyak kapal yang tidak dapat melaut karna larangan tersebut. seperti tahun ini jumlah kapal nelayan di Indonesia sebanyak 768.123 kapal/perahu dan terbagi atas 2 yaitu di perairan laut sebanyak 568.329 kapal/perahu dan perairan umum sebanyak 199.794 kapal/perahu. di tahun 2016 jumlah kapal/perahu di Indonesia juga mengalami

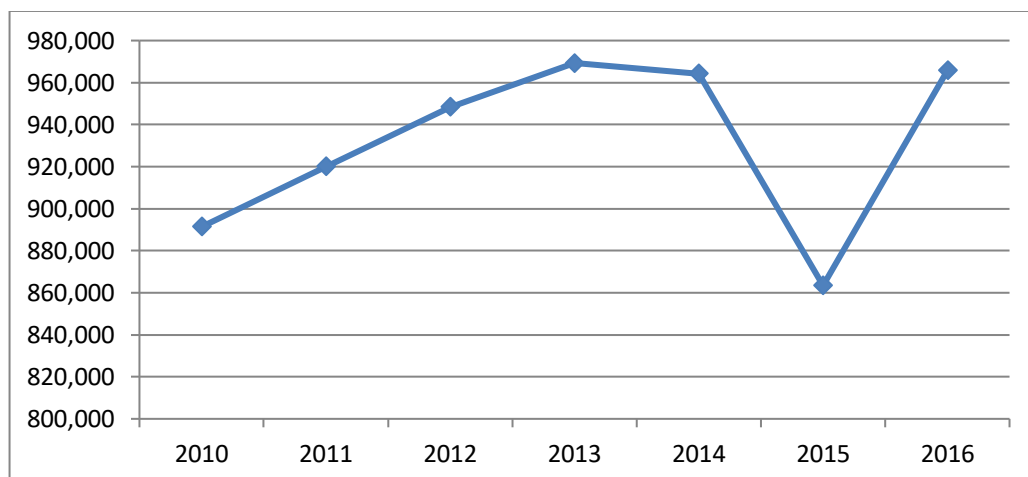
penurunan dan pada tahun ini jumlahnya sebanyak 726.984 kapal/perahu yang ada di Indonesia yang terbagi dari periran umum sebanyak 183.139 kapal/perahu dan perairan laut sebanyak 543.845 kapal/perahu hal ini karna masih berlakunya larangan penangkapan dengan pukat helai dan cantrang.

#### 4.2.4 Perkembangan Nelayan Dan Pengusaha Perikanan Darat

nelayan artinya yaitu orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan/hewan laut lainnya,yang secara aktif di lakukan demi kebutuhan hidup. perkembangan nelayan di Indonesia dari tahun 2010-2013 mengalami kenaikan walaupun tidak begitu besar dan pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan dan di 2016 mengalami kenaikan lagi seperti yang terdapat pada tabel berikut ini :

**Grafik 4.5**

**Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Tahun 2010-2016**



sumber: BPS indonesia

Dari tabel di atas dari tahun 2010 sampai 2011 jumlah rumah tangga nelayan mengalami peningkatan tentu merupakan kabar baik dalam sektor

perikanan kerna dengan meningkatnya jumlah nelayan tentu sudah dapat mengurangi pengangguran dan meningkat produksi perikanan. pada tahun ini kenaikan di dasarkan dengan adanya peraturan pemerintah dalam rancangan 5 tahun kedepan yang di keluarkan pada periode 2010-2015 dijabarkan dalam enam kegiatan, yaitu: (1) Pengelolaan SDI, (2) Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan pengawakan kapal perikanan, (3) Pengembangan, pembangunan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan, (4) Pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan, (5) Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil, dan (6) Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Keenam kinerja kegiatan DJPT tersebut disesuaikan dengan empat tujuan utama pilar pembangunan nasional, yaitu *pro growth, pro environment, pro poor, dan pro job*. dan kenaikan ini terjadi sampai pada tahun 2013. dan pada tahun 2014 mengalami penurunan yang lumayan besar yaitu sebesar 5099 rumah tangga tangkap. Ada beberapa penyebabnya, seperti cuaca yang tidak menentu sehingga nelayan tak mau ambil risiko. dan pada tahun ini adanya pembatasan BBM bagi nelayan makanya mengalami penurunan pada jumlah nelayan dan banyak menjadi beralih profesi.. pada tahun 2015 terjadi penurunan yang cukup besar yaitu sekitar 100,814 rumah tangga tangkap yang berkurang dari tahun 2014 hal ini di sebabkan pada tahun ini kementrian kelautan juga mengeluarkan putusan larangan tentang penggunaan alat tangkap Pukat Hela dan Pukat Tarik sehingga berimbas pada nelayan yang menggunakan alat tangkap tersebut. karna hal ini banyak nelayan yang tidak dapat melaut karna larangan penggunaan alat tersebut hal ini banyak yang beralih profesi demi mencukupi kebutuhan sehari-harinya dalam hal

ini mengakibatkan terjadinya jumlah rumah tangga perikanan tangkap yang sangat besar. dan pada tahun 2016 jumlah rumah tangga tangkap mengalami kenaikan yang cukup besar hampir mencapai jumlah pada tahun 2013 dan sudah melewati 2013 yang lalu. atau kenaikan jumlah rumah tangga perikanan tangkap mencapai sebesar 102,339 rumah tangkap pada tahun 2016 ini. peningkatan yang cukup besar dan tentu hal ini meningkatkan produksi perikanan Indonesia dan menyerap tenaga kerja. dalam hal ini peningkatan jumlah rumah tangga perikanan tangkap tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang berimbas banyak nelayan bisa kembali melaut dan kembali kepada pekerjaannya yang dulu. kebijakan pemerintah pada tahun ini demi mendorong peningkatan nelayan yaitu adanya asuransi premi yang di keluarkan pemerintah ada juga permodalan yang sangat membantu nelayan kembali melaut lagi. berdasarkan data OJK, Desember 2016 jumlah yang telah di berikan kredit perbankan mencapai 95.398 milyar rupiah tentu ini menjadi suatu yang positif bagi nelayan dengan adanya permodalan ini. dan hal ini tidak terlepas dari kebijakan yang di keluarkan pemerintah yaitu Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam.

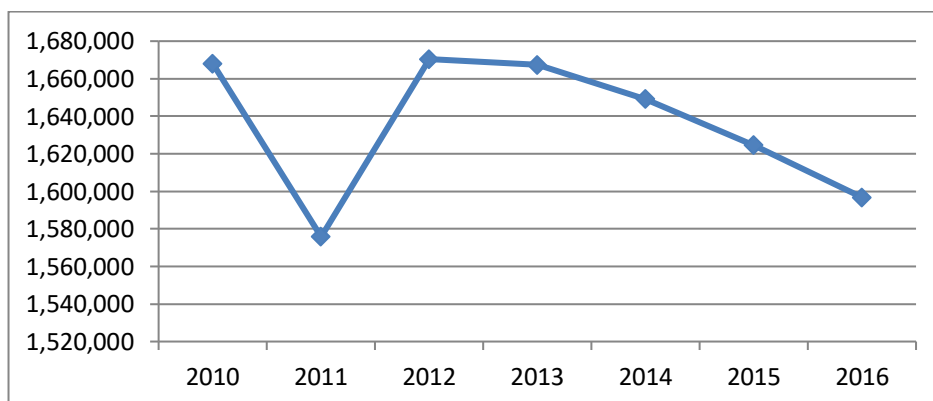
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan budi daya, petambak garam kecil, dan penggarap tambak garam, termasuk keluarga nelayan dan pembudidaya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil melalui penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, baik untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan kemampuan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Pembiayaan mikro bagi nelayan ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penyaluran pembiayaan permodalan nelayan skala mikro ini disalurkan LPMUKP melalui kerja sama dengan Lembaga Keuangan Mkikro (LKM) dan LKM Syariah serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR syariah yang sudah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tapi lain halnya dengan pengusaha perikanan darat pada tahun 2010-2017 jumlah rumah tangga perikanan darat (budidaya) mangalami naik turun seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini:

**Grafik 4.6**

**Jumlah Rumah Tangga Perikanan Darat Tahun 2010-2016**



*Sumber: BPS Indonesia*



dari tabel di atas dapat kita lihat jumlah rumah tangga dari tahun 2010 sampai tahun 2011 mengalami penurunann yang begitu besar yang mencapai 92,162 rumah tangga perikanan darat mengalami penurunan. penurunan ini terjadi di karnakan kenaikan harga benih ikan yang terus terjadi pada tahun ini tentu berimbas pada nelayan yang berpikir kembali untuk melakukan pembudidayan ikan. serta kemarau panjang yang terjadi di wilayah Indonesia mengakibatkan banyak pembudidaya beralih profesi, karna musim kemarau sangat berpengaruh terhadap jumlah air dan suhu air dalam hal ini menjadi suatu kendala bagi perikanan darat. pada tahun 2012 jumlah rumah tangga perikanan darat mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu mencapai 94,660 rumah tangga perikanan darat. hal ini sudah melewati jumlah penurunan yang terjadi di tahun 2011 yang hanya mencapai 92,162 rumah tangga perikanan darat. peningkatan pada tahu 2012 tentu adanya dorongan pemerintah terhadap perikanan budidaya saalah satunya dengan adanya subsidi benih ikan yang di keluarkan pamarintah dan pakan perikanan. pada tahun 2013 mengalai penurunan jumlah Rumah tangga perikanan darat hal ini di karnakan banyaknya yang kurang memahami tentang pemahaman perikanan budidaya dalam hal ini banyak yang jadi gagal dan beralih profesi lagi. pada tahun 2014 mengalami penurunan kembali hal ini di karnakan masih kurangnya pemhaman tentang perikanan budidaya,dan di berbagai daerah terjadi kelangkaan benih ikan. dan pada tahun 2015 perikanan darat juga mengalami penurunan jumlah rumah tangga perikanan darat. hal ini terjadi karna mahalnya kembali pakan ikan dan benih ikan yang terjadi di berbagai daerah mengakibatkan mahalnya biaya produksi bagi perikanan darat menyebabkan banyak penurunan rumah tangga perikanan darat. dan pada tahun 2016 juga

mengalami penurunan yang sangat besar di karnaka terjadi kelangkaan di berbagai daerah dan hal ini juga berpengaruh pada mahal nya harga benih ikan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1.KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Kebijakan pemerintah terhadap perikanan di Indonesia ini di tahun 2010-2014 memang bertujuan untuk meningkatkan sektor perikanan di Indonesia tetapi pemerintah pada tahun ini masih kurang terhadap pengawasan perairan Indonesia hal ini mengakibatkan kerugian bagi Indonesia dan pada tahun ini pemerintah lebih berfokus pada minapolitan seperti yang tercantum dalam keputusan menteri perikanan pada tahun 2013 tentang penetapan kawasan minapolitan. adapun keputusan tersebut untuk memajukan perikanan budidaya di Indonesia. Dalam keputusan kementrian kelautan dan perikanan salah satunya yaitu pertama menetapkan 179 kabupaten/kota sebagai kawasan minapolitan pada 33 provinsi.kedua kawasan minapolitan sebagai mana di maksud diktum kesatu terdiri dari 202 lokasi minapolitan dengan penggerak/kegiatan utama sebanyak 145 perikanan budidaya dan 57 perikanan tangkap.
2. Kebijakann perikanan pada tahun 2015-2017 yaitu hanya berfokus pada pengawasan perairan Indonesia demi membasmi *Illegal Fishing* yang ada di Indonesia. hal ini tercantum pada keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Satuan Tugas Pencegahan Dan Pemberantasan *Illegal, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING*. Yaitu tentang betapa pentingnya

peranan pengawasan perikanan di Indonesia. dan pada tahun 2015 ini juga kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan larangan tentang penggunaan alat tangkap sebagai mana yang tercantum dalam PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik DI Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

3. Perkembangan perikanan di Indonesia tahun 2010-2017 PDB perikanan Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, baik di tahun 2010-2014 kenaikannya tidak begitu besar di lihat dari presentasinya dari tahun 2010 hanya mencapai 2,091% dan sampai tahun 2014 hanya mencapai 2,207% dan pada tahun 2015 hanya mencapai 2,271% sampai 2017 hanya mencapai 2,292%.
4. Pada ekspor perikanan Indonesia nilai ekspor dari 2010 tahun sampai 2014 mengalami kenaikan dan pada tahun 2015 mengalami penurunan dan tahun 2016-2017 mengalami kenaikan hal ini juga tergantung pada nilai tukar Dollar walaupun volume ekspor mengalami penurunan tetapi nilai dollar mengalami kenaikan hal ini terjadinya kenaikan nilai eksportnya.
5. Produksi perikanan Indonesia mengalami dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan yang terbesar menyumbang yaitu perikanan darat.
6. Jumlah kapal berpengaruh pada produksi perikanan dan jumlah kapal tahun 2010-2014 terus mengalami peningkatan jumlahnya dan karna adanya larangan tentang alat tangkap di tahun 2015 berpengaruh pada jumlah kapal di Indonesia yang mengalami penurunan pada tahun 2015-2016.
7. Perkembangan jumlah rumah tangga tangkap di pengaruhi oleh kenaikan BBM dan pelerangan alat tangkap di Indonesia.

8. Jumlah rumah tangga perikanan darat di pengaruhi dengan kelangkaan benih dan mahal nya harga benih dan pangan menyebabkan naik turun nya jumlah rumah tangga perikanan darat.

## **5.2.SARAN**

1. Kebijakan pemerintah memang untuk meningkatkan sektor perikanan tetapi terkadang kurang memperhatikan bagi nelayan yang dan perikanan budidaya. dan kurangnya permodalan bagi pelaku usaha dan nelayan di Indonesia dan pemerintah harus nya bisa lebih meningkatkan sektor perikanan laut yang masih kurang berkontribusi terhadap PDB perikanan di Indonesia dan juga produksi perikanan Indonesia.

2. harus nya dengan pengawasan perairan Indonesia pemerintah mendorong nelayan dari sektor perikanan tangkap dengan memberikan bantuan dan pemahaman akan kerusakan lingkungan demi mendorong keberlangsungan ekosistem perikanan yang berkesinambungan.

3. Pemerintah harus lebih menjamin ketersediaan benih ikan dan pangan ikan dengan harga yang terjangkau agar biaya produksi dapat berkurang dan akan meningkatkan rumah tangga perikanan darat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Haryanto), Joko Setiyono<sup>2</sup>. 2017. KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU *ILLEGAL FISHING* OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017.
- KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/KEPMEN-KP/2013
- Parthiana, I Wayan, 2006, Hukum Pidana Internasional, Bandung : Yrama Widya
- Rahardja, Pratama & Manurung, Mandala. 2008. pengantar ilmu ekonomi makroekonomi & mikroekonomi. edisi ketiga, jakarta; lembaga penerbit Fakultas ekonomi universitas indonesia.
- PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik DI Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia
- Setiawati, wiwit. 2006. Analisis pengaruh faktor produksi terhadap produksi industri pengasapan ikan di kota semarang, semarang ; megister ilmu ekonomi dan studi pembangunan universitas diponegoro
- Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Kelima : Penerbit CV. Alfabeta: Bandung
- Sukirno, Sadono. 2000. makroekonomi modern. jakarta; PT. Raja Grafindo Parsada
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut.
- Badan pusat statistik indonesia. 2017. Nilai ekspor komoditi perikanan .  
[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Badan pusat statistik indonesia. 2018. PDB perikanan dengan harga konstan.  
[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Badan Pusat Statistik Indonesia.2017. Produksi Perikanan Indonesia.  
[www.Bps.go.id](http://www.Bps.go.id)

Badan Pusat Statistik Indonesia.2016.Jumlah Kapal/perahu Nelayan.  
[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Badan Pusat Statistik Indonesia. 2016.Jumlah Rumah Tangga Perikanan tangkap.  
[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Badan Pusat Statistik Indonesia. 2016.Jumlah Rumah Tangga Perikanan darat.  
[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

BPK RI.2017.Perlindungan dan pemberdayaan nelayan,pembudidya ikan dan petembak garam. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37237/uu-no-7-tahun-2016>

Elviana Roza.2017.Maritim Indonesia,Kemewahan yg luar biasa .Kementrian Keleutan dan Perikanan Indonesia.; <https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>

Hukumonline.com.2014.undang-undang no.31 tahun 2004 tentang perikanan.  
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c4ecc907e223/node/20143> pada 9 desember 2018.

Lidya,kambaren.2018.CNCBINDONESIA.ZamanJokowi,488KapalIlegalDitenggelamkan.<https://www.cnbcindonesia.com/news/2018082116329617/zaman-jokowi-488-kapal-ilegal-ditenggelamkan>

**BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN**

Pada hari ini **SALMAN FARIS** tanggal Jum'at, 09 Agustus 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan **SALMAN FARIS** menerangkan bahwa :

**N a m a** : SALMAN FARIS  
**N .P.M.** : 1505180008  
**Tempat / Tgl.Lahir** : Silenjang, 08 Agustus 1996  
**Alamat Rumah** : Jamin Ginting Gg.Aman No5  
**JudulProposal** :ANALISIS KOMPARATIF KEBIJAKAN EKONOMI SUBSEKTOR PERIKANAN PADA TAHUN 2010-2017

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	✓
Bab I	identifikasi masalah lebih jelas. + baik
Bab II	~
Bab III	✓
Lainnya	
Kesimpulan	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, Jum'at, 09 Agustus 2019

**TIM SEMINAR**

Ketua



Dr.PRAWIDYA HARIANI RS., S.E., M.Si.

Pembimbing



Dra.Hj.LAILAN SAFINA, M.Si.

Sekretaris



Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.

Pembanding



Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.





PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari *Jum'at, 09 Agustus 2019* menyorotkan bahwa:

Nama : SALMAN FARIS  
N.P.M. : 1505180008  
Tempat / Tgl.Lahir : Silenjang, 08 Agustus 1996  
Alamat Rumah : Jamin Ginting Gg.Aman No5  
JudulProposal : ANALISIS KOMPARATIF KEBIJAKAN EKONOMI SUBSEKTOR PERIKANAN PADA TAHUN 2010-2017

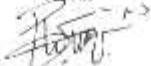
Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan

pembimbing : *Dra.Hj.LAILAN SAFINA,M.Si.*

Medan, *Jum'at, 09 Agustus 2019*

TIM SEMINAR

Ketua



*Dr.PRAWIDYA HARIANI RS,SE., M.Si.*

Sekretaris



*Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.*

Pembimbing



*Dra.Hj.LAILAN SAFINA,M.Si.*

Pembanding



*Dra.Hj.ROSWITA HAFNI,M.Si.*

Diketahui / Disetujui  
A.n. Dekan  
Wakil Dekan - I



*ADE GUNAWAN,S.E., M.Si.*



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

UNIVERSITAS/ PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS : EKONOMI  
JURUSAN / PROG. STUDI : IESP  
JENJANG : STRATA SATU (S-1)  
KETUA JURUSAN : Dra. PRAWIDYA HARIANI RS., SE., M.Si  
DOSEN PEMBIMBING : Dra. LAILAN SAFINA HSB., M.Si  
NAMA MAHASISWA : SALMAN PARIS  
NPM : 1505180008  
PROGRAM STUDI : IESP  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KOMPARATIF KEBIJAKAN EKONOMI  
SUB SEKTOR PERIKANAN PADA TAHUN 2010-2017

TGL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
10/12/2018	- Masukkan data pendukung - Kaitkan dgn illegal fishing - Masukkan teori Pengipn. ds	} Lu	
13/12/2019	- Berbalik: identifikasi masalah dan manfaat penelitian - Buat tahapan penelitian dan definisi operasional - Daftar pustaka disesuaikan.	} Lu	
03/07/2019	- Hasil selesai disesuaikan dan ACC untuk seminar proposal	} Lu	

Pembimbing Proposal

Dra LAILAN SAFINA HSB.M.Si

Medan, Juli 2019  
Diketahui/ Disetujui  
Ketua Jurusan IESP

Dra.PRAWIDYA HARIANI RS., SE., M.Si

## **SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Salman Paris  
NPM : 1505180008  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Ekonomi Pembangunan)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/ skripsi.
2. ~~Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang~~ apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
  - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
  - Mercayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 4 Juli ..... 2019  
Pembuat Pernyataan



**Salman Paris**

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 86/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/26/11/2018

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan,

Medan, 26/11/2018

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Salman Paris  
NPM : 1505180003  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : -

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : -  
Rencana Judul : 1. Analisis komparatif kebijakan ekonomi sub sektor perikanan pada era SBY-BOEDIONO dengan JOKOWI-JK di Indonesia  
2. -  
3. -

Objek/Lokasi Penelitian : Kementerian Perikanan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Bermohon

(Salman Paris)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Baeri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 86/IDL/SKR/EP/FEB/UMSU/26/11/2018

Nama Mahasiswa	: Salim Paris
NPM	: 1505180008
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi	:
Tanggal Pengajuan Judul	: 26/11/2018
Judul yang disetujui Program Studi	: Nomor ....., atau; Alternatif judul lainnya.....
	.....(Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Nama Dosen pembimbing	: <u>LAILAN SARIHA HSB</u> .....(Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing	: .....
	.....(Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan, .....

Dosen Pembimbing

(.....)



**UMSU**

Jeguk, Cerdas, Terpercaya

Membentuk insan agribisnis yang tangguh

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 7496 TGS / U.3-AU / UMSU-05 / F / 2018**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Pada Tanggal : 04 Desember 2018

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : SALMAN PARIS  
N.P.M : 1505180008  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Komperatif Kebijakan Ekonomi Sub Sektor Perikanan Pada Era SBY -Boedionn Dengan Jokowi-JK Di Indonesia**

Dosen Pembimbing : **Dra.LAILAN SAFINA HSB,M.Si.**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 04 Desember 2019**
4. Revisi Judul.....

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 26 Rabiul Awwal 1440 H  
04 Desember 2018 M



Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peringgal.